



**ANALISIS PENGARUH *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY*, *AUDIT COMMITTEE* DAN *CAPITAL INTENSITY* TERHADAP *TAX AVOIDANCE***

(Studi Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia)

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Pada  
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Jember

Oleh

**Elman Wahas Risqilah**

**130810301057**

**JURUSAN AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS JEMBER**

**2020**

## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Ibunda Suti'ah dan bapak Ahjar Wiyono serta saudara perempuan yang  
tercinta;
2. Keluarga besar nenek ibu Poniti yang tercinta;
3. Almamater Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember

## **MOTO**

“Tujuan atau maksud yang baik atau membuat suatu kebaikan, tidak dengan sendirinya membenarkan cara untuk mencapainya”.

(Gus Bahauddin Nur Salim)

“Keterbukaan adalah kerendahan hati untuk tidak merasa selalu benar serta kesediaan mendengar orang lain dan mengambil mana yang baik”

(Prof. Dr. Nurcholish Madjid)

## PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : ELMAN WAHAS RISQILAH

NIM : 130810301057

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul "*Analisis Pengaruh Corporate Social Responsibility, Audit Committee, dan Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance (Studi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2016)*" adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan di institusi mana pun, dan bukan karya plagiasi. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus di junjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari ini tidak benar.

Jember, 16 Januari 2020



(Elman Wanas Risqilah)

NIM: 130810301057

## PERSETUJUAN

### TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

**Judul Skripsi** : Analisis Pengaruh Corporate Social Responsibility, Audit Committee, dan Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2016)

**Nama Mahasiswa** : Elman Wahas Risqilah

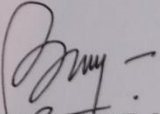
**NIM** : 130810301057

**Fakultas** : Ekonomi dan Bisnis

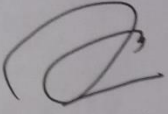
**Jurusan** : S1 Akuntansi

**Tanggal Persetujuan** : 25 Juni 2019

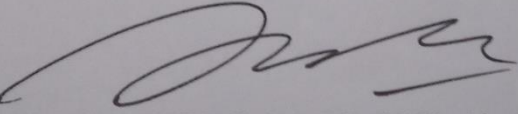
Pembimbing I,

  
Bunga Maharani, S.E., M.SA., CA  
NIP. 198503012010122005

Pembimbing II,

  
Drs. Wasito M. Si, Ak, CA  
NIP. 196001031991031001

Mengetahui,  
Ketua Program Studi S1 Akuntansi

  
Dr. Agung Budi Sulistivo, S.E., M.Si., Ak. CA  
NIP. 197809272001121002

## **PENGESAHAN**

## RINGKAKASAN

**Analisis Pengaruh *Corporate Social Responsibility*, *Audit Committee*, dan *Capital Intensity* Terhadap *Tax Avoidance*** (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2016); Elman Wahas Risqilah 130810301057; 2020; 51 halaman; Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Jember.

Pajak menjadi tumpuan utama di Indonesia, dibuktikan dengan realisasi pendapatan yang bersumber dari pajak sebesar 1.942,3 T (78,34%) pada tahun 2018. Pemerintah melalui Ditjen Pajak berupaya memenuhi kebutuhan penerimaan negara untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Namun upaya tersebut berlawanan dengan Wajib Pajak. Perilaku Wajib Pajak secara logis muncul rasa enggan untuk melunasi pajak yang terhutang dan sebisa mungkin meminimalkan beban pajak atas penghasilan mereka (Saputra dalam Alfia, 2016). Hal ini juga berlaku untuk Wajib Pajak (badan) yang telah menyajikan tanggungjawab sosialnya ataupun belum. Tidak mematuhi ketentuan yakni kontribusi wajib atas penghasilan yang diperoleh Wajib Pajak, merupakan tindakan yang kurang etis. Bagi Wajib Pajak (badan) yang telah melaporkan aktivitas CSR-nya, dapat memberikan indikasi bahwa aktivitas CSR hanya dilakukan untuk menutupi penghindaran pajak yang telah dilakukan atau hanya untuk memunculkan biaya yang dapat mengurangi Penghasilan Kena Pajak. Penambahan aset tetap merupakan salah satu strategi manejer dalam konteks bagaimana sumberdaya (modal) digunakan dengan efisien dan efektif untuk meningkatkan penjualan. Akan tetapi, penambahan aset tetap juga secara otomatis meningkatkan biaya depresiasi, dimana merupakan biaya yang dapat mengurangi penghasilan bruto. Maka, penambahan aset tetap juga dapat mengindikasikan bahwa perusahaan sedang melakukan upaya pengurangan terhadap Penghasilan Kena Pajak. Komite audit selaku pihak yang dibentuk untuk melakukan pengawasan terhadap aktivitas tata kelola perusahaan, dapat meningkatkan integritas dan kredibilitas pelaporan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh *corporate social responsibility*, *audit committee*, dan *capital intensity* terhadap *tax avoidance* yang diprosikan oleh *cash effective tax*

*ratio* (CETR). Luas pengungkapan *corporate social responsibilty* diukur berdasarkan item-item aktivitas sosial yang telah di sesuaikan untuk aktivitas sosial perusahaan di Indonesia (Sembiring, 2009), *audit commite* diproksikan dengan rasio anggota komite audit di luar komisaris, *capital intensity* diukur dengan *capital intensity ratio* (CIR). Populasi penelitian yang digunakan yakni perusahaan manufaktur yang terdaftar di Busa Efek Indonesi (BEI) periode 2014-2016. Sampel penelitian terdiri dari 65 perusahaan yang dipilih menggunakan metode *puposive sampling* dari 137 perusahaan yang terdaftar di sektor manufaktur Bursa Efek Indonesia. Data yang digunakan merupakan laporan tahunan perusahaan didapatkan dari situs Bursa Efek Indonesia dan situs perusahaan yang menjadi sampel. Metode pengujian hipotesis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan *corporate social repsonsibility*, *audit committee* dan *capital intensity* berpengaruh terhadap *tax avoidance*.



## PRAKATA

Puji syukur ke haridat Allah SWT, atas segala rahmah dan taufi-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “ Analisis pengaruh *corpotate social responsibility*, *audit committee*, dan *Capital Intensity* terhadap *tax avoidance* (Studi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2016). Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Muhammad Miqdad, S.E., MM., Ak, CA., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember;
2. Bapak Dr. Agung Budi Sulistiyo, S.E., M. Si., Ak., selaku Kepala Program Studi S1 Akuntansi;
3. Ibu Bunga Maharani S.E., M.SA.,CA., selaku Dosen Pembimbing Utama, Bapak Drs. Wasito M.Si., Ak, CA., selaku Dosen Pembimbing Anggota yang telah meluangkan waktu, pikiran, dan perhatian dalam penulisan skripsi ini;
4. Indah Purnamawati S.E., M. Si., Ak, CA., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing selama penulis sebagai mahasiswa;
5. Teman-teman “Sekawan” yang telah memberikan semangat demi terselesainya skripsi ini;
6. Keluarga besar HMI Cabang Jember Komisariat Ekonomi yang memberi *support* yang tak ternilai;
7. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Penulis juga menerima segala kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap, semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

Jember, Januari 2020

Penulis

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	ii
<b>HALAMAN MOTO</b> .....	iii
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	iv
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	v
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	vi
<b>RINGKASAN/SUMMARY</b> .....	vii
<b>PRAKATA</b> .....	ix
<b>DAFTAR ISI</b> .....	x
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xiii
<b>BAB 1. PENDAHULUAN</b>	
<b>1.1 Latar Belakang</b> .....	1
<b>1.2 Rumusan Masalah</b> .....	7
<b>1.3 Tujuan Penelitian</b> .....	7
<b>1.4 Manfaat Penelitian</b> .....	7
<b>BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA</b>	
<b>2.1. Teori Keagenan</b> .....	8
<b>2.2. Teori Legitimasi</b> .....	9
<b>2.3. <i>Corporate Social Responsibility</i></b> .....	10
<b>2.4. <i>Audit Committee</i></b> .....	13
<b>2.5. <i>Capital Intensity</i></b> .....	15
<b>2.6. Tax Avoidance</b> .....	16
<b>2.7. Penelitian Terdahulu</b> .....	17
<b>2.8. Kerangka Teoritis</b> .....	20
<b>2.9. Pengembangan Hipotesis</b> .....	21
2.9.1. Pengaruh <i>Corporate Social Responsibility</i> Terhadap <i>Tax avoidance</i> .....	21
2.9.2. Pengaruh <i>Audit Committee</i> Terhadap <i>Tax</i> <i>Avoidance</i> .....	22
2.9.3. Pengaruh <i>Capital Intensity</i> Terhadap <i>Tax</i> <i>Avoidance</i> .....	23
<b>BAB 3. METODE PENELITIAN</b>	
<b>3.1. Rancangan Penelitian</b> .....	24
<b>3.2. Populasi dan Sampel</b> .....	24
<b>3.3. Jenis dan Sumber Data</b> .....	25
3.3.1. Jenis Data.....	25
3.3.2. Sumber Data.....	25
<b>3.4. Metode Pengumpulan Data</b> .....	25
<b>3.5. Definisi Operasional Variabel dan Skala Pengukuran</b> .....	26
3.5.1. Variabel Dependen.....	26
3.5.2. Variabel Independen.....	26
3.5.3. Variabel Kontrol.....	28

3.6.	<b>Metode Analisis Data dan Pengujian Hipotesis</b>	28
3.6.1.	Uji Asumsi Klasik	28
a.	Uji Normalitas	29
b.	Uji Multikolinieritas	29
c.	Uji Autokolinieritas	30
d.	Uji Heteroskedastisitas	30
3.6.2.	Regresi Linier Berganda	30
3.6.3.	Koefisien Diterminasi	31
3.6.4.	Uji Kelayakan Model ( <i>Goodness of Kit</i> )	32
3.6.5.	Uji t	32
3.7.	<b>Kerangka Pemecahan Masalah</b>	33
<b>BAB 4.</b>	<b>HASIL DAN PEMBAHASAN</b>	
4.1.	<b>Gambaran Umum</b>	34
4.1.1.	Sampel Penelitian	34
4.1.2.	Deskripsi Sampel Penelitian	35
4.2.	<b>Analisis Data</b>	35
4.2.1.	Statistik Deskriptif	35
4.2.2.	Uji Asumsi Klasik	37
a.	Uji Normalitas	37
b.	Uji Multikolinieritas	37
c.	Uji Autokolinieritas	38
d.	Uji Heterokedastisitas	39
4.2.3.	Analisis Regresi Linier Berganda	40
4.2.4.	Uji Hipotesis	41
a.	Uji Koefisien Determinasi	41
b.	Uji Kelayakan Model	42
c.	Uji t	42
4.3.	<b>Pembahasan</b>	44
4.3.1.	Pengaruh <i>Corporate Social Responsibility</i> Terhadap <i>Tax Avoidance</i>	44
4.3.2.	Pengaruh <i>Audit Committee</i> Terhadap <i>Tax Avoidance</i>	45
4.3.3.	Pengaruh <i>Capital Intensity</i> Terhadap <i>Tax Avoidance</i>	46
<b>BAB 5.</b>	<b>KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN</b>	
5.1.	<b>Kesimpulan</b>	48
5.2.	<b>Keterbatasan</b>	48
5.3.	<b>Saran</b>	49
	<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	50
	<b>DAFTAR LAMPIRAN</b>	54

## DAFTAR TABEL

	<b>Halaman</b>
<b>Tabel 2.1. Pengaruh <i>Corporate Social Responsibility</i> terhadap <i>Tax Avoidance</i></b>	
<b>Tabel 2.2. Pengaruh <i>Audit Committee</i> terhadap <i>Tax Avoidance</i>.....</b>	18
<b>Tabel 2.3. Pengaruh <i>Capital Intensity</i> terhadap <i>Tax Avoidance</i>.....</b>	19
<b>Tabel 4.1 Kriteria Pemilihan Sampel Penelitian.....</b>	34
<b>Tabel 4.2 Hasil Statistik Deskriptif .....</b>	35
<b>Tabel 4.3 Hasil Uji Normalitas.....</b>	37
<b>Tabel 4.4 Hasil Uji Multikolinieritas.....</b>	38
<b>Tabel 4.5 Hasil Uji Autokorelasi.....</b>	38
<b>Tabel 4.6 Hasil Uji Glejser.....</b>	39
<b>Tabel 4.7 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda .....</b>	40
<b>Tabel 4.8 Hasil Uji R<sup>2</sup> .....</b>	41
<b>Tabel 4.9 Hasil Uji <i>Goodness of fit</i> .....</b>	42
<b>Tabel 4.6 Hasil Uji t.....</b>	43

## DAFTAR GAMBAR

### Halaman

<b>Gambar 2.1. Kerangka konseptual penelitian.....</b>	<b>20</b>
--------------------------------------------------------	-----------

## **BAB 1. PENDAHULUAN**

### **1.1.Latar Belakang**

Direktorat Jendral Pajak Indonesia menerapkan sistem *self assessment* yakni memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak (WP) pribadi atau badan untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya melalui Surat Pemberitahuan (SPT). Sistem tersebut memberikan kemungkinan munculnya upaya pengurangan biaya atas pajak yang harus disetorkan oleh wajib pajak. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Undang-Undang No. 28, 2007). Pajak merupakan biaya yang pengembaliannya (*benefit*) tidak dinikmati secara langsung oleh wajib pajak. Jika dalam konteks perusahaan, maka pajak merupakan investasi yang habis masa manfaatnya ketika dikeluarkan. Menurut Undang-Undang no. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi syarat subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jendral Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (pasal 2 UU Nomor 28, 2007). Pajak menjadi salah satu instrumen pendapatan (*revenue*) bagi Indonesia dan menjadi tumpuan utama dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Hal demikian dibuktikan dengan prosentase pendapatan negara yang bersumber dari sektor pajak sebesar 78,34% dari total realisasi pendapatan negara tahun anggaran 2018 sebesar 1.942,3 triliun rupiah ([www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id)).

Pajak memiliki beberapa fungsi, pertama sebagai *Budgeter*, bahwa pajak merupakan sumber pembiayaan negara. Kedua sebagai *regulated* yaitu sebagai alat pengatur dengan pengertian, pajak dapat dijadikan sebagai instrumen untuk mencapai tujuan tertentu ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)). Penerimaan dari sektor ini menjadi salah satu sumber pendapatan penting bagi pemerintah Indonesia untuk pembiayaan operasional pemerintahan. Pemerintah melalui Ditjen Pajak berupaya mencapai target atau realisasi pendapatan yang telah dianggarkan didalam APBN. Hal itu berlawanan dengan wajib pajak keinginan untuk meminimalkan pajak yang harus dibayar. Leon Yudkin (dalam Pohan, 2011) mempertegas bahwa tidak seorangpun senang membayar pajak; (1) wajib pajak selalu berusaha untuk membayar pajak yang terhutang sekecil mungkin, sepanjang hal itu dimungkinkan oleh undang-undang; (2) wajib pajak cenderung untuk menyelundupkan pajak (*tax evasion*) yakni usaha penghindaran pajak yang terhutang secara ilegal, sepanjang wajib pajak tersebut mempunyai alasan yang meyakinkan bahwa kemungkinan besar mereka tidak akan ditangkap dan yakin bahwa orang lainpun berbuat hal yang sama. Tahun 2016 kasus penghindaran pajak (*tax avoidance*) dengan skala global menyeruak ke ruang publik melalui media berita, yang dikenal sebagai *Panama Papers*. *International Consortium of Investigative Journalists* (ICIJ) dalam laporannya ditemukannya bukti perilaku penghindaran pajak dilakukan oleh beberapa wajib pajak lingkup nasional baik pribadi maupun badan dengan memanfaatkan suaka pajak di negara lain.

Perilaku wajib pajak secara logis muncul rasa enggan untuk melunasi pajak yang terhutang dan sebisa mungkin meminimalkan beban pajak atas penghasilan mereka (Saputra dalam Alfia, 2016). Sedangkan ketaatan membayar pajak merupakan suatu wujud tanggungjawab perusahaan kepada *stakeholder* (pemerintah). Penghindaran pajak dilakukan dengan memanfaatkan celah (*loophole*) dari peraturan perpajakan dan secara hukum diperbolehkan oleh undang-undang.

Pedoman pelaksanaan tanggungjawab sosial (*corporate social responsibility*) tercantum dalam UU nomor 40/2007 tentang Perseroan

Terbatas (PT) pasal 74 ayat 1 dan 2 yang menyatakan bahwa perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggungjawab sosial dan lingkungan, yang dianggarkan serta diperhitungkan sebagai biaya perseroan dengan kepatutan dan kewajaran. Menurut Borglund (dalam Grahovar, 2010) *Stakeholder* akan percaya bahwa aktivitas sosial perusahaan dianggap penting bagi perusahaan dalam upaya penciptaan nilai di masyarakat. Investor individual tertarik pada informasi sosial yang dilaporkan dalam laporan tahunan (Epstein dan Freedman, 1994).

Pengungkapan tanggungjawab sosial (*corporate social responsibility-CSR*) perusahaan merupakan aktivitas komunikasi secara sosial dari kegiatan ekonomi organisasi terhadap kelompok khusus yang berkepentingan dan masyarakat secara keseluruhan (Hackston dan Milne, dalam Sembiring 2005). Perusahaan yang terlibat penghindaran pajak adalah perusahaan yang tidak bertanggungjawab (Lanis dan Richardson, dalam Muzakki dan Darsono, 2015). Hal tersebut memberikan pengertian bahwa meskipun secara peraturan tidak melanggar hukum, namun perilaku penghindaran pajak merupakan perilaku negatif bagi pemerintah.

Menurut teori legitimasi (*legitimacy theory*), perusahaan selalu berusaha menciptakan keselarasan antara nilai-nilai perusahaan dengan norma-norma sosial (Dowling dan Prefer dalam Muzakki dan Darsono, 2015). Melaporkan serta membayar pajak yang terhutang secara tertib merupakan suatu bentuk keselarasan tersebut. Perusahaan yang mengungkapkan banyak informasi tentang aktivitas CSR berharap memperoleh legitimasi dari publik bahwa aktivitasnya telah sesuai ekspektasi masyarakat (Ratmono dan Sagala, 2015). Pelaksanaan tanggungjawab sosial di Indonesia masih sangat terbatas baik secara kualitas maupun luasnya tingkatnya pengungkapan. Djajadikerta dan Trireksani (dalam Wahyudi, 2015) menemukan bahwa praktek dan pemahaman CSR perusahaan Indonesia, baik yang sensitif maupun yang non sensitif terhadap lingkungan, masih sangat terbatas. Hal ini juga dibuktikan dengan temuan Centre for Governance, Institutions, and



Organizations (CGIO) University of Singapore, bahwa pemahaman perusahaan terhadap praktik CSR masih rendah menyebabkan rendahnya kualitas pelaksanaan (CNNIndonesia, 2016). Penghindaran pajak perusahaan merupakan suatu tindakan yang tidak bertanggungjawab, karena salah satu tanggungjawab perusahaan adalah dimulai dengan memberikan kontribusi kepada masyarakat melalui pajak pemerintah (Landolf dalam Muzakki dan Darsono, 2015). Carrol dan Joulfian (Muzakki dan Darsono, 2015) berpendapat bahwa beberapa perusahaan yang mengklaim melakukan CSR tetap melakukan penghindaran pajak.

Beberapa penelitian berupaya untuk mendeteksi variabel yang dimungkinkan berpengaruh terhadap aktivitas penghindaran pajak. Penelitian yang menunjukkan adanya pengaruh signifikan antara aktivitas tanggungjawab sosial (CSR) dengan kepatuhan pajak (*effective tax rate*) yang dilakukan oleh Muzakki dan Darsono (2015), dan Pradnyadari dan Rohman (2015). Sedangkan Mahanani *et. al* (2016) tidak menemukan hubungan antara kedua variabel tersebut. Belkauoi dan Katpik (dalam Sembiring, 2005) mengatakan keanekaragaman hasil penelitian tersebut sebagian disebabkan karena model yang dikembangkan merupakan model yang sangat sederhana dan pengukuran yang digunakan juga tidak konsisten.

Terdapat strategi yang secara undang-undang diperbolehkan sebagai pengurangan penghasilan kena pajak, yakni biaya penyusutan atas aset tetap. Penyusutan adalah alokasi sistematis jumlah yang dapat disusutkan (*depreciable amount*) dari suatu aset selama umur manfaatnya (*useful life*) (PSAK-16;02, 2012). Aset tetap yang dimiliki perusahaan memungkinkan perusahaan untuk memotong pajak akibat depresiasi dari aset tetap setiap tahunnya (Rodriguez dan Arias dalam Muzakki dan Darsono, 2015). Seberapa besar investasi perusahaan dalam bentuk aset tetap dapat gambarkan dengan intensitas penggunaan modal (Lanis dan Richardson dalam Pradnyadani dan Rohman, 2015) . Terdapat penelitian yang mencoba membuktikan hubungan antara intensitas modal (*Capital intensity*) dengan upaya penghindaran pajak. Akan tetapi disisi lain,

penggunakan kas atau modal untuk investasi berupa aset tetap sebagai kebijakan yang sangat wajar. Muzakki dan Darsono (2015), dan Putri dan Lautina (2016) menemukan adanya pengaruh signifikan antara *Capital intensity* dengan kepatuhan pajak. Hasil berbeda ditemukan oleh Ardyansah dan Zulaikha (2014), dan Wiguna dan Jati (2017) bahwa tidak menemukan pengaruh antar kedua variabel tersebut.

Penelitian ini mengembangkan penelitian Muzakki dan Darsono (2015), dengan menambahkan faktor lain yakni komite audit yang dimungkinkan mempengaruhi pelaporan pajak serta berbeda waktu (periode pelaporan tahunan) penelitian. Komite audit memiliki peran membantu pengawasan dan pengendalian terhadap penyajian laporan keuangan dan kepatuhan perusahaan terhadap regulasi. Diharapkan dengan perannya dapat menekan kesalahan penyajian laporan keuangan dan menekan aktivitas yang bertentangan dengan peraturan pajak. Variabel komite audit diukur dengan prosentase anggota yang tidak memiliki hubungan dengan perusahaan didalam susunan komite audit. Beasley (dalam pamudji dan trihartati, 2010) membuktikan terdapat pengaruh signifikan antara jumlah anggota independen dalam susunan komite audit terhadap kecurangan dalam laporan keuangan. The Blue Ribbon Committe (dalam Pamudji dan Trihartati, 2010) merekomendasikan bahwa komite audit seharusnya hanya terdiri dari komisaris yang tidak memiliki hubungan dengan perusahaan sehingga dapat memperkuat independensinya. Hal tersebut didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Ardyansah dan Zulaikha (2014) bahwa perusahaan dengan proporsi komisaris independen yang lebih banyak, melaporkan beban pajak lebih tinggi. Diperkuat oleh hasil penelitian yang dilakukan Wibawa *et. al* (2016), bahwa komite audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Peneliti menggunakan perusahaan manufaktur sebagai objek penelitian karena Menurut Marfuah dan Cahyono (2011) perusahaan manufaktur cenderung memiliki dampak lingkungan sosial yang lebih besar dibandingkan perusahaan non-manufaktur. Penelitian ini ingin menganalisis beberapa faktor yang dimungkinkan berpengaruh terhadap

perilaku penghindaran pajak, khususnya pada perusahaan manufaktur. Tahun 2014 merupakan tahun dimana konvergensi IFRS secara efektif berlaku (per 1 Januari 2014) dan telah terjadinya penyesuaian PSAK 46 tentang pajak penghasilan dengan perkembangan sistem perpajakan yang ada. Hal ini mendorong perusahaan untuk melakukan penilaian kembali atas asetnya dan dapat mempengaruhi pelaporan penghasilan kena pajak. Peneliti menggunakan data yang berasal dari laporan tahunan (*annual report*) perusahaan manufaktur, dimulai periode pelaporan 2014 sampai 2016. Harapannya dengan rentang pengamatan yang telah ditetapkan, peneliti mendapatkan kesimpulan secara valid atas perilaku perusahaan manufaktur sebagai Wajib Pajak.

## 1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian sebelumnya, penulis menyusun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini;

1. Apakah *Coporate Social Responsibility* berpengaruh terhadap *tax avoidance* ?
2. Apakah *audit commitee* berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
3. Apakah *capital intensity* berpengaruh terhadap *tax avoidance*?

## 1.3. Tujuan Penelitian

1. Menguji dan menganalisis pengaruh *Corporate Social Responsibility* terhadap *tax avoidance*?
2. Menguji dan menganalisis pengaruh *audit committee* terhadap *tax avoidane*?
3. Menguji dan menganalisis pengaruh *capital intensity* terhadap *tax avoidance*?

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

1. Bagi teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sumber referensi atau bahan perbandingan dengan penelitian sebelumnya sesuai topik yang diteliti, serta menambah bukti empiris dari teori-teori yang ada.

2. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian diharapkan dapat menunjukkan bagaimana sikap perusahaan manufaktur sebagai wajib pajak dalam menerapkan strategi pajaknya, dan melakukan peningkatan pengawasan terhadap skema penghindaran pajak yang dimungkinkan dilakukan oleh perusahaan.

3. Bagi peneliti

Hasil penelitian memberikan tambahan wawasan secara empiris mengenai permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

## BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

### 2. 1. Teori Keagenan

Teori keagenan atau *agency theory* menjelaskan hubungan kontraktual antara pemberi wewenang/pemilik (*principal*) dan penerima wewenang/manajer (*agent*). Manajer menerima wewenang mengelola perusahaan/melakukan aktivitas-aktivitas *management* berasal dari pemilik/pemberi wewenang mengelola. Jensen dan Meckling (dalam Migdad, 2013) menjelaskan bahwa hubungan keagenan itu sebagai kontrak yang dilakukan oleh satu orang atau lebih (prinsipal) dan orang lain (agen atau penerima amanat), untuk melakukan kegiatan atau jasa (*service*) yang sudah didelegasikan dan mengambil keputusan yang menjadi kewenangannya.

Migdad (2013) memberikan kesimpulan dengan melihat dua sudut pandang ekonomi dan hukum mengenai fokus dari teori keagenan yaitu; 1) secara ekonomi, teori agensi memprediksi dan menjelaskan perilaku pihak-pihak yang terlibat dengan perusahaan, 2) secara hukum, agen adalah seseorang yang dipekerjakan untuk kepentingan pihak lain yang terikat dalam perjanjian kontraktual. Berkaitan dengan aktivitas perpajakan, hubungan antara perusahaan selaku wajib pajak (agen) dengan DJP (Direktorat Jendral Pajak) oleh fiskus (prinsipal) memiliki kepentingan memenuhi kebutuhan anggaran pendapatan negara yang telah tercantum dalam APBN/D melalui aktivitas pemungutan pajak. Munculnya kepentingan tersebut, tidak selalu direspon positif oleh setiap wajib pajak disebabkan perbedaan kepentingan (*self interest*) meminimalkan biaya pajak yang harus dibayarkan. Konflik kepentingan antara DJP dengan perusahaan terjadi ketika pihak perusahaan menginginkan pengeluaran biaya pajak paling minimum (*tax planning*) karena *out-cash flow* untuk pajak tidak memiliki efek secara langsung kepada pendapatan perusahaan, sedangkan fiskus berkeinginan untuk

mewujudkan ketertiban perpajakan melalui memungut pajak dari penghasilan riil yang diperoleh perusahaan dari hasil usahanya.

## **2. 2. Teori Legitimasi**

Aktivitas sosial yang dilakukan oleh perusahaan untuk memberikan klaim bahwa perusahaan memiliki dukungan penuh terhadap aktivitas sosial dan lingkungan. Hidayatul dan Fidiana (2017) menjelaskan bahwa keberadaan perusahaan dalam suatu area karena didukung secara politis dan dijamin oleh regulasi pemerintah yang juga merupakan representasi dari masyarakat. Hal tersebut menegaskan munculnya kepentingan diluar pemegang saham (*return*) ketika entitas atau perusahaan berdiri secara legal. Legitimasi diperoleh organisasi ketika dalam kondisi atau status ketika sistem nilai sebuah entitas merupakan bagian dari lingkungan itu sendiri (Gray dalam Ratmono dan Sagala, 2015). Ketika pelaksanaan aktivitas sosial diungkapkan termasuk didalamnya tertib membayar pajak, memunculkan persepsi bahwa perusahaan menyadari keberlangsungan hidupnya terikat oleh hubungan sosial yang baik serta kedekatan dengan masyarakat serta lingkungan (alam). Patel (dalam Yudarwati, 2011) memberikan penegasan bahwa perusahaan tidak hanya menggunakan sumber daya material dan informasi teknikal dalam bertahan hidup, tetapi perusahaan sangat memerlukan legitimasi dari lingkungannya.

Secara umum, legitimasi merupakan lisensi sosial dari masyarakat untuk kelangsungan organisasi (Chung dalam Yudarwati, 2011). Untuk mendapatkan legitimasi dari investor, maka perusahaan harus selalu menaati kontrak yang ada dan memastikan bahwa kebijakan perusahaan selalu mengutamakan kepentingan pihak-pihak yang berkepentingan. Legitimasi yang berasal dari pemerintah dan masyarakat secara umum akan didapatkan ketika perusahaan selalu berperilaku transparan, akuntabel dan tertib hukum. Suchman (dalam Yudarwati, 2011) menjelaskan bahwa legitimasi dapat menjadi pemicu datangnya sumber

daya lain dan dukungan dari masyarakat kepada perusahaan. Terdapat indikasi bahwa keberlangsungan perusahaan bukan hanya berapa besar profitabilitas yang dihasilkan, tetapi apakah perusahaan telah menjalankan peran sosial kepada masyarakat dan lingkungan. Norma perusahaan selalu berubah mengikuti perubahan dari waktu ke waktu sehingga perusahaan harus mengikuti perkembangannya (Suryana, 2011).

### **2. 3. Corporate Social Responsibility**

Konsep tanggungjawab sosial perusahaan telah dikenal sejak awal 1970, yang secara umum diartikan sebagai kumpulan kebijakan dan praktik yang berhubungan dengan *stakeholder*, nilai-nilai, pemenuhan ketentuan hukum, opini masyarakat, lingkungan alam, serta komitmen dunia usaha berkontribusi dalam pembangunan secara berkelanjutan (*sustainable development*). Konsep CSR dipandang sebagai konsep akuntansi baru, yang transparansi terhadap pengungkapan sosial yang dilakukan perusahaan (Sagala dan Ratmono, 2015). *Continuing commitment by bussiness to be have ethically and contribute to economic development while improving the quality of life of the workforce and they families as well as of the local community and society at large* (The World Bussiness Council for Sustainable Development, 2000). Dunia bisnis tidak hanya memperhatikan catatan keuangan perusahaan semata (*single bottom line*), melainkan sudah meliputi keuangan, sosial, dan aspek lingkungan yang disebut dengan *triple bottom line*. Sinergitas tiga elemen ini merupakan kunci dari konsep pembangunan berkelanjutan (Siregar, 2007). World Bank memandang CSR sebagai, *“The commitment of bussiness to contribute to sustainable economic development working with employes and their representatives the local community and society at large to improve quality og life, in ways that are both good for bussiness and good for development”*.

*Corporate Social Responsibility* (CSR) harus dipahami dalam dimensi masyarakat sosial, merupakan salah satu bentuk *social contract*

yang harus ditaati secara konsisten dan penuh komitmen oleh perusahaan, untuk mewujudkan kualitas lingkungan secara berkelanjutan bagi pihak-pihak berkepentingan (*stakeholder*). Menurut *International Institute for Sustainable Development* (IISD) terdapat beberapa alasan perusahaan atau manajemen melakukan aktivitas sosial yakni;

1. Peran pemerintah yang menyusut

Pemerintah di masa lalu mengandalkan undang-undang dan peraturan dengan memberikan tujuan sosial dan lingkungan pada sektor bisnis. Ketidakmampuan pemerintah, ditampah dengan ketidakpercayaan publik terhadap peraturan, telah menyebabkan eksplorasi inisiatif sukarela dan non-regulasi.

2. Permintaan untuk pengungkapan yang lebih luas

Adanya permintaan perluasan pengungkapan oleh perusahaan dari pemangku kepentingan, termasuk pelanggan, pemasok, karyawan, masyarakat, investor, dan aktivis sosial.

3. Meningkatnya ketertarikan konsumen

Terdapat bukti bahwa perilaku etis perusahaan memberikan pengaruh terhadap keputusan pembelian mereka. Suatu survei yang dilakukan oleh *International Environics* menemukan bahwa satu dari lima konsumen memilih produk perusahaan yang memperoleh penghargaan atas kinerja sosial mereka.

4. Menumbuhkan intervensi investor

Investor melakukan penilaian kinerja perusahaan, dan membuat keputusan berdasarkan kriteria yang mencakup permasalahan etika. Social Invest Forum melaporkan bahwa tahun 1999 di Amerika Serikat, lebih dari \$ 2 Juta dollar aset yang diinvestasikan dalam portofolio yang berkaitan dengan lingkungan dan tanggungjawab sosial. Suatu terpisah yang dilakukan oleh International Environics mengungkapkan bahwa lebih dari seperempat saham yang milik masyarakat Amerika menggunakan pertimbangan etis saat membeli dan menjual saham.



5. Bursa tenaga kerja yang kompetitif

Karyawan tidak hanya melihat pada gaji dan tunjangan, mereka juga lebih memilih pengusaha yang secara filosofis dan praktik operasinya sesuai prinsip yang mereka pegang. Untuk menerima dan mempertahankan karyawan yang kompeten, perusahaan dipaksa memperbaiki lingkungan kerjanya.

6. Relasi pemasok

Semakin tertariknya para *stakeholder* terhadap kegiatan bisnis semata, banyak perusahaan mengambil inisiatif untuk memastikan bahwa mitra mereka melakukan tanggungjawab sosial. Beberapa memperlihatkan kode etik untuk pemasok merek, memastikan bawah kebijakan atau praktik perusahaan lain tidak merusak reputasi perusahaan.

Global Reporting Initiative (GRI) merupakan organisasi yang dibentuk dengan tujuan utama yakni pencapaian transparansi dan pelaporan melalui standar dan pedoman pengungkapan laporan keberlanjutan (*sustainability report*). Mereka memberikan perluasan terhadap sudut pandang yang diterapkan dalam mengukur suatu aktivitas perusahaan baik sebelum atau sesudah aktivitas tersebut dilakukan. Setiap aktivitas perusahaan harus memenuhi beberapa prinsip (GRI-G3 Guidelines) yakni; keseimbangan, dapat dibandingkan, akurat,urut waktu, kesesuaian dan dapat dipertanggungjawabkan. Adapun pengungkapan standar dalam laporan keberlanjutan menurut GRI-G3 Guidelines terdiri dari; ekonomi, lingkungan, hak asasi manusia, masyarakat, tanggungjawab produk, serta sosial.

Sembiring (2005) mengatakan bahwa indikator yang dikemukakan GRI dinilai kurang sesuai digunakan untuk entitas bisnis di Indonesia, karena item-item dalam kategori GRI memiliki cakupan terlalu dalam dan bersifat khusus, sedangkan di Indonesia kegiatan CSR yang dilakukan masih bersifat umum. Terdapat beberapa indikator pengungkapan dipakai Sembiring dalam penelitiannya di Indonesia yang merupakan hasil adopsi penelitian Hackston dan Milne tahun 1996 yakni; kategori lingkungan,

kategori energi, kategori kesehatan dan keselamatan tenaga kerja, kategori lain-lain tenaga kerja, kategori produk, kategori keterlibatan masyarakat, dan kategori umum. Dan dirinci menjadi 78 indikator atau item penilaian keluasan pengungkapan CSR oleh perusahaan untuk masing-masing industri dalam negeri yang berstatus perusahaan *go public* atau terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).

#### **2.4. Audit Committee**

Komite audit (*committee audit*) memiliki tugas melakukan pengawasan termasuk penelaahan laporan keuangan dan kepatuhan terhadap regulasi serta membuat rekomendasi kepada dewan komisari atas hasil pemeriksaan yang telah dilakukan. Komite audit memiliki struktur fungsional dibentuk oleh dewan komisaris, terdiri dari orang-orang yang tidak terlibat dalam pengurusan perusahaan dan pihak-pihak terafiliasi, paling sedikit 3 anggota (efektif) dimana harus independen, objektif dan, profesional. Annisa dan Kurniasih (2012), menyatakan bahwa keberadaan komite audit memiliki pengaruh terhadap aktivitas *tax avoidance*. Proporsi komisaris independen yang lebih banyak melaporkan pajak yang lebih tinggi (Ardyansah dan Zulaikha, 2014). Semakin tinggi keberadaan komite audit dalam perusahaan dapat meningkatkan kualitas tata kelola perusahaan untuk meminimalkan kemungkinan manajemen melakukan tindakan di luar kontrak atau melanggar peraturan yang berlaku.

Pasal 7 ayat a-k POJK No. 55/POJK.04/2015 tentang pembentukan dan pedoman pelaksanaan kerja komite audit menyebutkan, prasyarat keanggotaan dan masa tugas yakni;

- a. Wajib memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan, pengalaman, sesuai bidang pekerjaannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik.
- b. Wajib memahami laporan keuangan, bisnis perusahaan khususnya yang terkait dengan layanan jasa atau kegiatan usaha emiten atau perusahaan publik.

- c. Wajib mematuhi kode etik komite audit yang ditetapkan oleh emiten atau perusahaan publik.
- d. Bersedia meningkatkan kompetensi secara terus menerus melalui pendidikan dan pelatihan.
- e. Wajib memiliki pang sedikit 1 (satu) anggota yang berlatar belakang pendidikan dan keahlian di bidang akuntansi dan keuangan.
- f. Bukan merupakan orang dalam kantor akuntan publik, kantor konsultan hukum, kantor jasa penilaian publik atau pihak lain yang memberikan penilaian dan/atau jasa konsultasi lain kepada emiten atau perusahaan publik yang bersangkutan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir.
- g. Bukan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggungjawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan emiten atau perusahaan publik yang bersangkutan dalam kurun waktu kurang dari 6 (enam) bulan terakhir kecuali komisaris independen.
- h. Tidak mempunyai saham langsung maupun tidak langsung pada emiten atau perusahaan publik.
- i. Dalam hal anggota komite audit memperoleh saham emiten atau perusahaan publik baik langsung maupun tidak langsung akibat suatu peristiwa hukum, saham tersebut wajib dialihkan kepada pihak lain dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah diperolehnya saham tersebut.
- j. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan anggota dewan komisaris, anggota direksi, atau pemegang saham utama emiten atau perusahaan publik.
- k. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha emiten atau perusahaan publik.

Point h, j, dan k diatas menjelaskan bahwa komite audit tidak boleh memiliki hubungan dalam bentuk apapun dengan perusahaan/emiten yang dalam pengawasannya. Independensi merupakan karakteristik yang harus dipenuhi oleh anggota komite audit dalam membantu melakukan pengawasan dewan komisaris (Pamudji dan Trihartati, 2010). Kualifikasi terpenting dari anggota komite audit terletak pada *common sense*, kecerdasan dan suatu pandangan yang independen, tidak mungkin untuk melakukan negosiasi terhadap ketaatan terhadap kesempatan kontraktual dan peraturan yang berlaku. Siallagan dan Machfoedz (2006) menegaskan komite audit meningkatkan integritas dan kredibilitas pelaporan keuangan melalui;

1. Pengawasan atas proses pelaporan termasuk sistem pengendalian internal.
2. Penggunaan prinsip akuntansi berterima umum.
3. Mengawasi proses audit secara keseluruhan.

## **2. 5. Capital Intensity**

Intensitas modal (*capital intensity*) adalah seberapa besar perusahaan menginvestasikan asetnya dalam aset tetap dan persediaan (Muzakki dan Darsono, 2015). Rasio investasi perusahaan dapat memberikan sinyal kepada stakeholder bahwa perusahaan telah melakukan efisiensi modal perusahaan. Cammanor dan Wilson (dalam Putri dan Lautina, 2016) menjelaskan bahwa *capital intensity ratio* merupakan salah satu informasi penting bagi investor, karena dapat menunjukkan tingkat efisiensi penggunaan modal yang telah ditanamkan. Perusahaan secara tidak langsung, menginginkan modal yang lebih banyak untuk menghasilkan produk yang efisien selama periode bersangkutan. Disisi lain Rodrigues dan Arias (dalam Ardyansah dan Zulaikha, 2014) menegaskan bahwa aset tetap yang dimiliki perusahaan memungkinkan perusahaan untuk memotong pajak akibat depresiasi dari aset tetap setiap tahunnya. Pasal 6:1b (Undang-Undang No. 36/2008) menjelaskan bahwa

beban penyusutan atas harta berwujud yang memiliki masa manfaat lebih dari satu (1) tahun dapat mengurangi penghasilan bruto pada periode tertentu. Hal tersebut memberikan signal bahwa selain efisiensi penggunaan modal, perusahaan juga berkeinginan memanfaatkan peraturan tersebut sebagai celah untuk mengurangi jumlah penghasilan kena pajak pada setiap periode pelaporan.

## 2. 6. Tax avoidance

Di Indonesia Wajib Pajak (WP) memiliki keleluasaan untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri kewajiban pajaknya merupakan *self assessment* dan hal ini di atur dalam undang-undang perpajakan Indonesia. Penerapan sistem tersebut tentu memberi peluang Wajib Pajak untuk menekan biaya pajak, sebagai bentuk efisiensi penggunaan modal. Memanfaatkan kelemahan peraturan (*loophole*) untuk kepentingan pribadi (*self interest*) tentu merupakan sesuatu tindakan yang diperbolehkan secara hukum. Pohan (2011) menjelaskan bahwa *tax avoidance* adalah upaya penghindaran pajak dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak, tanpa bertentangan dengan ketentuan perpajakan yang berlaku dimana metode dan teknik yang cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam Undang-Undang dan peraturan perpajakan itu sendiri untuk memperkecil jumlah pajak yang terhutang. Disisi lain tindakan tersebut merupakan tindakan kurang terhormat yang disebabkan oleh rasa enggan wajib pajak untuk ikut bersama-sama berkontribusi terhadap pembangunan nasional. Astuti dan Aryani (2016) membuktikan bahwa tingkat penghindaran pajak perusahaan manufaktur di indonesia semakin tinggi.

Nugroho (2009) menjelaskan beberapa karakteristik penghindaran pajak (*tax avoidance*) yakni;

1. Belum timbulnya hutang pajak (*tax liability*) karena kewajiban subjektif dan/atau kewajiban objektifnya belum terpenuhi. Kewajiban subjektif yakni tidak terdaftar sebagai Wajib Pajak

dalam Dirjen Pajak. Sedangkan kewajiban objektif, penghasilan yang didapatkan tidak memenuhi sebagai dasar perhitungan pajak, dalam konteks unit usaha dapat dikarenakan mengalami laba negatif.

2. Penggunaan cara-cara yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan (*abusive*) dari peraturan-peraturan di bidang perpajakan namun tidak dikategorikan sebagai tindak pidana. Hal ini dilakukan dengan memanfaatkan celah-celah hukum yang terdapat dalam peraturan-peraturan atau bahkan yang terdapat dalam konsep dan rasionalisasi adanya kebijakan-kebijakan di bidang perpajakan.
3. Merekayasa (*artifisial*) penyajian yang tidak mencerminkan keadaan ekonomis yang sebenarnya atau seharusnya terjadi.

## 2.7. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu mengenai pengaruh variabel *corporate social responsibility*, *audit committee* dan *capital intensity* terhadap perilaku penghindaran pajak menghasilkan temuan yang kontradiksi, dan disajikan secara rinci dalam tabel berikut;

**Tabel 2.1. Pengaruh *Corporate Social Responsibility* terhadap *Tax Avoidance***

No.	Peneliti (tahun)	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Wahyudi, Dudi (2015)	Variabel Independen; <i>Corporate Social Responsibility</i> Variabel dependen; Penghindaran pajak	<i>Corporate Social Responsibility</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak
2.	Sari, L.L.P, dan Adiwibowo, A.A. (2017)	Variabel Independen; <i>Corporate Social Responsibility</i>	<i>Corporate Social Responsibility</i> memiliki pengaruh

		Variabel Dependen; Penghindaran pajak	signifikan terhadap penghindaran pajak
--	--	------------------------------------------	-------------------------------------------

**Tabel 2.2. Pengaruh *Audit Committee* terhadap *Tax Avoidance***

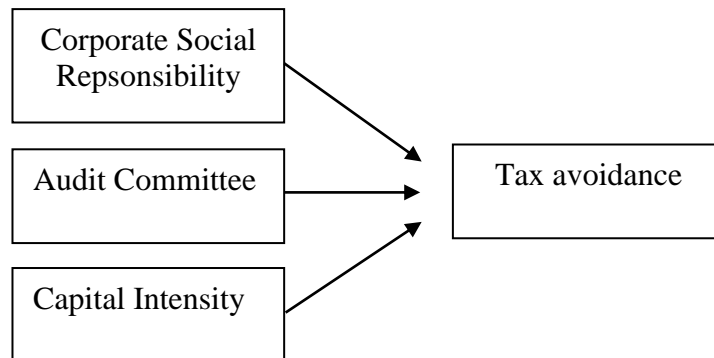
No.	Peneliti (tahun)	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Winata (2014)	Variabel independen; Komite audit Variabel dependen; Penghindaran pajak	Komite audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak
2.	Lin Wulandari <i>et., al.</i> (2016)	Variabel independen; Komisaris independen, komite audit, investor institusi Variabel dependen; <i>Effective Tax Rate</i>	Komisari independen berpengaruh terhadap <i>Effective Tax Rate</i> dengan koefisien positif, sedangkan komite audit dan investor institusional tidak berpengaruh terhadap <i>Effective Tax Rate</i>

**Tabel 2.3. Pengaruh *Capital Intensity* terhadap *Tax Avoidance***

1.	Danis Ardyansah dan Zulaikha (2014)	<p>Variabel independen; <i>Size, Leverage, Profitabilitas, Capital Intensity</i>, dan Komisari Independen.</p> <p>Variabel dependen; <i>Effective Tax Rate</i></p>	<p>Size dan komisaris independen berpengaruh terhadap <i>Effective Tax Rate</i> sedangkan leverage, profitabilitas, dan capital intensity tidak berpengaruh terhadap <i>Effective Tax Rate</i></p>
2.	Wijayanti, A., et. al. (2016)	<p>Variabel independen; Ukuran perusahaan, <i>leverage</i>, intensitas modal, komisaris independen, komite audit, <i>Corporate Social Responsibility</i></p> <p>Variabel dependen; Penghindaran pajak</p>	<p>Ukuran perusahaan, <i>leverage</i>, dan intensitas modal berpengaruh terhadap penghindaran pajak, sedangkan komisaris independen, komite audit, <i>Corporate Social Responsibility</i> tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak</p>



## 2. 8. Kerangka Teoritis



**Gambar 2.1. Kerangka konseptual penelitian**

Gambar kerangka konseptual diatas, dijelaskan bahwa *corporate social responsibility* memberikan penilaian positif terhadap manajemen perusahaan melalui pengungkapan aktivitas CSRnya. Legitimasi sosial yang muncul ketika perusahaan melakukan pengungkapan CSR secara konsisten menurunkan kemungkinan perusahaan melakukan aktivitas penghindaran pajak. Komite audit merupakan badan yang dibentuk oleh dewan direksi memiliki membantu fungsi pengawasan dewan komisaris yang bertugas memberikan pandangan mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan kebijakan keuangan, akuntansi dan pengendalian internal (Andi, 2010).

Tujuan dibentuknya komite audit yakni, membantu pengawasan dewan komisaris dan sikap independen yang diimplementasikan menjadi sangat penting. Independensi komite audit merupakan hal terpenting. Kinerja komite audit menjadi efektif jika para anggotanya memiliki sikap independensi dalam menyatakan sikap dan pendapat (Pamudji dan Trihartati, 2010). Efisiensi penggunaan modal merupakan suatu upaya positif yang diberikan manajemen kepada investor, sebagai bentuk komitmennya terhadap kontrak. Akan tetapi disisi lain, memberikan kemungkinan bahwa adanya strategi memperbesar biaya depresiasi atau penyusutan agar memperkecil hitungan beban pajak yang terhutang.

## 2. 9. Pengembangan Hipotesis

### 2.9.1. Pengaruh *Corporate Social Responsibility* Terhadap *Tax Avoidance*.

Kepatuhan wajib pajak (WP) badan kepada *stakeholder* (Dirjen Pajak) sebagai bentuk kontribusi wajib, merupakan komitmen dalam partisipasi pembangunan nasional. Perspektif masyarakat termasuk pemerintah, perusahaan memiliki kewajiban membayar biaya pajak atas pendapatan yang diperoleh. Hal tersebut disebabkan karena perusahaan telah mendapatkan izin usaha dari pemerintah dimana perusahaan melakukan usahanya. Teori legitimasi menjelaskan bahwa perusahaan selalu berusaha menciptakan keselarasan antara nilai-nilai perusahaan dengan norma-norma sosial (Dowling dan Prefer dalam Muzakki dan Darsono, 2015). Melaporkan serta membayar pajak yang terhutang secara tertib merupakan suatu bentuk keselarasan tersebut. Perusahaan dapat memperoleh legitimasi dari masyarakat serta dapat mempertahankan kedudukan yang baik dengan otoritas pajak dengan memenuhi dan konsisten mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku (Christensen dan Murphy dalam Lanis dan Richardson, 2012). Kewajiban yang melekat pada unit usaha bukan hanya bagaimana kontribusi perusahaan terhadap penerimaan pajak negara, tetapi juga bagaimana kontribusi dalam lingkungan masyarakat sosial baik internal maupun eksternal yang biasa disebut *corporate social responsibility* atau *sustainability*.

Perusahaan yang mengungkapkan banyak informasi tentang aktivitas CSR berharap memperoleh legitimasi dari publik bahwa aktivitasnya telah sesuai ekspektasi masyarakat (Ratmono dan Sagala, 2015). Semua kepentingan yang melingkupi entitas usaha, harus secara adil dan konsisten diakomodir oleh perusahaan sebagai bentuk komitmen kontrak usaha termasuk kontrak dengan lingkungan sosial. Pelaksanaan aktivitas CSR merupakan salah satu kontribusi wajib kepada lingkungan sosialnya, dan tentunya memunculkan biaya yang harus dianggarkan. Namun dalam implementasinya Willian (dalam Lanis dan Richardson, 2012) mengatakan sulit untuk membedakan antara CSR yang dilakukan

dengan motif altruistik dengan CSR yang dilakukan dengan tujuan untuk menguntungkan reputasi perusahaan. Carrol dan Joulfian (Muzakki dan Darsono, 2015) berpendapat bahwa beberapa perusahaan yang mengklaim melakukan CSR tetap melakukan penghindaran pajak.

Penelitian terdahulu dilakukan oleh Sari dan Adiwibowo (2017) menemukan bahwa CSR berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Pengungkapan aktivitas CSR yang telah dilakukan, diharapkan merupakan murni sikap altruistik terhadap lingkungan perusahaan secara umum dan wujud sikap tanggungjawab yang dibangun oleh perusahaan kepada masyarakat. Bukan hanya untuk mendapatkan legitimasi dari masyarakat. Berdasarkan uraian diatas maka diajukan hipotesis sebagai berikut;

**H1: *Corporate Social Responsibility* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance***

### **2.9.2. Pengaruh *Audit Committee* Terhadap *Tax Avoidance*.**

Pembentukan komite audit merupakan unsur penerapan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*). Komite audit memiliki tugas membantu dewan komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasannya. Tugas tersebut berkaitan erat dengan pengawasan dan memberi beberapa pilihan strategi yang dapat dipilih manajemen terhadap resiko yang dihadapi perusahaan. Mayangsari (dalam Fhadila, 2014) menjelaskan, komite audit berfungsi memberikan pandangan mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan kebijakan keuangan, akuntansi dan pengendalian intern. Menurut teori agensi, manajemen (*agen*) perlu melakukan efisiensi penggunaan kas salah satunya dengan memperkecil beban pajak. Peran komite audit, memberikan pilihan kebijakan yang tepat untuk diterapkan manajemen dalam upaya agar kinerja manajemen dinilai baik. Peraturan OJK No.55/POJK.04/2015 tentang pembentukan dan pedoman pelaksanaan kerja komite audit yang mewajibkan komite audit beranggotakan individu yang tidak berafiliasi dengan perusahaan. Teori legitimasi menjelaskan, bahwa pemenuhan

syarat independensi anggota komite audit merupakan upaya pemenuhan instrumen tata kelola yang baik dan mematuhi aturan Otoritas Jasa Keuangan. Perusahaan ingin memunculkan legitimasi bahwa telah diterapkannya pengawasan terhadap laporan keuangan dan kecil kemungkinan perusahaan melakukan strategi yang dapat mempengaruhi kepentingan *stakeholder* (pemerintah). Pohan (2008) dalam penelitiannya menemukan bahwa perusahaan dengan anggota komite audit kurang dari tiga anggota komite, akan meningkatkan resiko manajemen meminimalkan laba untuk kepentingan pajak. Penelitian tersebut didukung oleh Winata (2014) serta Dewi dan Jati (2014) menyatakan bahwa jumlah komite audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak, perusahaan dengan anggota komite audit lebih banyak akan memperkecil kemungkinan terjadinya tindakan *tax avoidance*. Berdasarkan uraian diatas maka diajukan hipotesis sebagai berikut;

**H2: *Audit Committee* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance***

**2.9.3. Pengaruh *Capital Intensity* Terhadap *Tax Avoidance*.**

Peraturan perpajakan mengenai pos biaya yang dapat dikurangkan dari pendapatan sebelum pajak memaparkan, biaya depresiasi merupakan pos biaya yang dapat dikurangkan dari pendapatan sebelum pajak. Penyusutan adalah alokasi sistematis jumlah yang dapat disusutkan (*depreciable amount*) dari suatu aset selama umur manfaatnya (*useful life*) (PSAK-16;02, 2012). Aset tetap yang dimiliki perusahaan memungkinkan perusahaan untuk memotong pajak akibat depresiasi dari aset tetap setiap tahunnya (Rodriguez dan Arias dalam Ardyansah dan Zulaikha, 2014). Rasio total aset tetap terhadap total aset perusahaan yang semakin besar, memberikan sinyal bahwa perusahaan telah melakukan efisiensi modal dan juga akan memunculkan biaya depresiasi yang tinggi.

Teori agensi menjelaskan, manajemen memiliki kepentingan sendiri (*self interest*) dalam menjalankan hak dan wewenangnya, dan akan selalu memiliki konflik kepentingan dengan *stakeholder*. Sabli dan Noor (dalam Ardyansah dan Zulaikha, 2014) menjelaskan bahwa perusahaan

yang mempunyai aset tetap yang tinggi cenderung melakukan perencanaan pajak, sehingga mempunyai *effective tax rate* yang rendah. Manajer menginvestasikan dana menganggur perusahaan ke dalam bentuk aset tetap, dengan tujuan memanfaatkan penyusutan sebagai pengurang beban pajak (Darsono dan Muzakki, 2015). Penelitian Wijayanti, A., *et. al.* (2016) menunjukkan bahwa adanya pengaruh intensitas modal terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan uraian diatas maka diajukan hipotesis sebagai berikut;

**H3: *Capital Intensity* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance***

## BAB 3. METODE PENELITIAN

### 3.1. Rancangan Penelitian

Penelitian dilakukan menggunakan rancangan penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif menekankan pada pengujian teori-teori melalui pengukuran variabel-variabel penelitian dengan angka dan melakukan analisis data dengan prosedur statistik (Indiarto dan Supomo, 2016). Menggunakan hipotesis *a priori* sebagai pedoman atau arah untuk memilih, mengumpulkan, dan menganalisis data serta melakukan pengamatan melalui validasi teori pada keadaan tertentu. Hasil pengujian data digunakan sebagai dasar penarikan kesimpulan penelitian: mendukung atau menolak hipotesis yang dikembangkan dari telaah teoritis (hipotesis *a priori*).

### 3.2. Populasi dan Sampel

Populasi penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang *listing* di Bursa Efek Indonesia (BEI). Perusahaan manufaktur cenderung memiliki dampak lingkungan/sosial yang lebih besar dibanding perusahaan jasa dan perdagangan (Marfuah dan Cahyono, 2011). Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling* dengan pertimbangan berikut;

- a. Perusahaan manufaktur yang *listing* di BEI tahun 2014-2016.
- b. Perusahaan tidak mengalami kerugian.
- c. Perusahaan menyajikan data yang diperlukan secara lengkap terkait variabel penelitian.
- d. Perusahaan dengan nilai *Cash Effective Tax Rate* (CETR) kurang dari satu, agar tidak membuat masalah dalam estimasi model (Gupta dan Newberry, 1997).

### **3.3. Jenis dan Sumber Data**

#### **3.3.1. Jenis data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Data kuantitatif adalah data yang berupa angka atau data kualitatif yang diangkakan (Sugiyono, 2011:15). Data kuantitatif berfungsi untuk mengetahui jumlah objek yang diteliti. Semua data kuantitatif dapat dianalisis dengan menggunakan analisis statistik, baik inferensial ataupun nonferensial. Data kuantitatif dari penelitian ini adalah data angka-angka yang disajikan dalam laporan keuangan dan laporan keberlanjutan perusahaan sampel yang nantinya diolah dengan teknik statistika.

#### **3.3.2. Sumber data**

Sumber data untuk menyelesaikan masalah, peneliti menggunakan data sekunder. Indrianto dan Supomo (2016) menjelaskan data sekunder merupakan data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder dalam penelitian ini yakni laporan keuangan dan catatan atas laporan keuangan perusahaan manufaktur periode 2014 s.d. 2016 yang dipublikasikan. Diperoleh dan dikumpulkan peneliti dengan mengakses *website* Bursa Efek Indonesia (BEI) [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id) berupa *annual report* dan *website* perusahaan.

### **3.4. Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan data-data yang sesuai dengan permasalahan dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode dokumentasi dokumen, yakni berupa laporan tahunan perusahaan selama periode 2014 s.d. 2016 yang diperoleh melalui *website* Bursa Efek Indonesia yaitu [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id). Peneliti juga menggunakan data melalui literatur lain seperti buku teks, jurnal ilmiah, artikel dan sumber tertulis lainnya sebagai informasi.

### 3.5. Definisi Operasional Variabel dan Skala Pengukurannya

Indrianto dan Supomo (2016) menjelaskan definisi operasional adalah penentuan *construct* sehingga menjadi variabel yang dapat diukur. Variabel yang diukur tersebut merupakan nilai untuk memberikan gambaran yang lebih kongkret mengenai fenomena-fenomena yang diwakilinya. Variabel dalam penelitian ini dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok yakni variabel dependen dan variabel independen.

#### 3.5.1. Variabel Dependen

Variabel dependen adalah tipe variabel yang dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel independen (Indrianto dan Supomo, 2016). Variabel dalam penelitian ini adalah *tax avoidance*. *Tax avoidance* atau penghindaran pajak merupakan usaha yang dilakukan untuk meminimalkan beban pajak atau pajak yang terhutang perusahaan secara legal dengan memanfaatkan celah peraturan perpajakan. Hanlon dan Heitzmen (2010) menjelaskan bahwa rasio pajak yang telah dibayar dengan pajak yang terhutang untuk periode tertentu mampu memberikan gambaran menyeluruh mengenai perubahan beban pajak periode tertentu, dan dalam penelitiannya memberikan beberapa alat ukur yang dapat digunakan sebagai mengukur penghindaran pajak perusahaan setiap periode pelaporan. Penelitian ini menggunakan *Cash ETR* dengan rumus (lampiran 1);

$$\text{Cash ETR} = \frac{\text{Cash Taxes Paid}}{\text{Pre-tax book income}}$$

#### 3.5.2. Variabel Independen

Variabel independen adalah tipe variabel yang menjelaskan atau mempengaruhi variabel yang lain (Indrianto dan Supomo, 2016). Variabel independen dalam penelitian ini sebagai berikut;



- a. *Corporate Social Responsibility* (CSR) atau tanggungjawab sosial perusahaan merupakan komitmen perusahaan untuk ikut dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan kepedulian lingkungan. Aktivitas sosial dan peduli lingkungan yang telah dilakukan perusahaan untuk setiap periode pelaporan, akan disajikan dalam laporan tahunan perusahaan. Keluasan pengungkapan aktivitas CSR perusahaan pada penelitian ini, peneliti menggunakan rasio pengungkapan CSR dengan tabel *checlist* yang mengacu pada beberapa indikator pengungkapan yang dipakai oleh Sembiring (2005) dalam penelitiannya di Indonesia. Kategori (*checklist*) ini diadopsi dari penelitian yang dilakukan oleh Hackston dan Milne pada tahun 1996 (Sembiring, 2005). Apabila kategori/item i diungkapkan maka diberikan nilai 1 (satu) dan 0 (nol) jika kategori/item i tidak diungkapkan pada tabel *checklist*. Adapun rumus CSRDI sebagai berikut;

$$CSRDI_j = \frac{\sum X_{ij}}{n_j}$$

CSRDI<sub>j</sub> : Indeks luas pengungkapan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan j.

X<sub>ij</sub> : Nilai 1 jika item i diungkapkan; nilai 0 (nol) jika kategori/item i tidak diungkapkan.

N<sub>j</sub> : Jumlah item untuk perusahaan j, n<sub>j</sub> ≤ 78

- b. Komite audit, merupakan pihak yang bertanggungjawab melakukan kontrol intern dan penyajian laporan keuangan, membantu komisaris dalam pelaksanaan pengawasan dan memenuhi syarat independensi komite audit tercantum dalam pasal 7 ayat a-k POJK No. 55/POJK.04/2015. Komite audit diukur dengan anggota independen diluar komisaris independen dibagi jumlah anggota komite audit (Diantari dan Ulupi, 2016). Semua anggota komite audit menurut aturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) wajib memenuhi syarat yakni tidak memiliki hubungan

dalam bentuk apapun dengan perusahaan yang sedang dalam pengawasannya.

$$KA = \frac{\Sigma \text{Anggota Independen}}{\Sigma \text{Anggota Komite Audit}}$$

- c. *Capital intensity* atau intensitas modal, total aset tetap perusahaan terhadap total penjualan pada periode tertentu (Sarton dalam Putri dan Lautina, 2016).

$$\text{Capital Intensity Ratio (CIR)} = \frac{\text{Total Aset Tetap}}{\text{Penjualan}}$$

### 3.5.3. Variabel Kontrol

## 3.6. Metode Analisis Data dan Pengujian Hipotesis

### 3.6.1. Uji Asumsi Klasik

Pengujian statistik dengan analisis regresi dapat dilakukan dengan pertimbangan tidak adanya pelanggaran terhadap asumsi klasik. Model regresi linier berganda dapat disebut sebagai model yang baik jika model tersebut memenuhi asumsi normalitas data dan bebas dari asumsi klasik statistik baik itu multikolinieritas, autokorelasi, dan heteroskedastisitas. Adapun asumsi-asumsi yang harus dipenuhi adalah: uji multikolinieritas, uji autokorelasi, dan uji heteroskedastisitas.

#### a. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Daya yang baik dan layak digunakan dalam penelitian adalah data yang memiliki distribusi normal (Sujarweni, 2015:52). Alat uji yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis grafik histogram dan grafik probability plot, serta uji statistik dengan *Kolmogorov-Smirnov Z (I-sample K-S)*.

Dasar pengambilan keputusan uji statistik dengan *Kolmogorov-Smirnov Z (I-sample K-S)* adalah (Ghozali, 2016):

1. Jika nilai *A symp. Sig. (2-tailed)* kurang dari 0,05, maka  $H_0$  ditolak. Hal ini berarti data residual terdistribusi tidak normal.
2. Jika nilai *A symp. Sig. (2-tailed)* lebih dari 0,05, maka  $H_0$  diterima. Hal ini berarti data residual terdistribusi normal.

#### **b. Uji Multikolinieritas**

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel independen (Ghozali, 2016). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Adanya multikolinieritas dapat dilihat dari *tolerance value* atau nilai *variance inflation factor (VIF)*. Jika  $VIF > 1$  : antar variabel terjadi korelasi, sedangkan jika  $VIF < 1$  : antara variabel independen tidak terjadi korelasi.

#### **c. Uji Autokorelasi**

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji ada tidaknya korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode  $t$  dalam model regresi linier. Salah satu cara untuk mendeteksi autokorelasi adalah dengan uji Durbin-Watson. Menurut Ghozali (2016), uji Durbin-Watson hanya digunakan untuk autokorelasi tingkat satu dan mensyaratkan adanya *intercept* (konstanta) dalam model regresi dan tidak ada variabel *lag* diantara variabel independen. Hipotesis yang akan diuji adalah  $H_0$ : tidak ada autokorelasi ( $r=0$ ) dan  $H_a$ : ada autokorelasi ( $r \neq 0$ ).

#### d. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Jika varian tetap maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2016). Terdapat beberapa teknik untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas. Penelitian ini menggunakan uji glejser dengan meregresi nilai *absolut residual* terhadap variabel independen. Jika nilai signifikansi variabel independen  $\geq 0.05$  (probabilitas) maka model regresi tidak terjadi adanya heteroskedastisitas.

#### 3.6.2. Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda adalah hubungan secara linier antara dua atau lebih variabel independen dengan variabel dependen. Analisis ini untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen berhubungan positif atau negatif dan untuk memprediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan. Pengolahan data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan *software Statistical Product and Service Solution (SPSS)* versi 23. Bentuk persamaan regresi dalam penelitian ini yakni;

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Keterangan;

Y	: Penghindaran pajak yang diprosikan oleh CETR
X <sub>1</sub>	: Luas pengungkapan aktivitas CSR
X <sub>2</sub>	: <i>Audit Committee</i>
X <sub>3</sub>	: <i>Capital Intensity</i>
$\beta_1, \beta_2, \beta_3$	: Koefisien Variabel

$\alpha$  : Konstanta  
 $e$  : *error item*

### 3.6.3. Koefisien Diterminasi

Menurut Ghozali (2016) menyatakan bahwa koefisien determinasi ( $R^2$ ) digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel independen. Nilai koefisien determinasi adalah 1 (satu) dan 0 (nol). Adanya kelemahan mendasar penggunaan koefisien determinasi yaitu bias terhadap jumlah variabel independen, maka dalam penelitian ini digunakan nilai *adjusted*  $R^2$  ketika mengevaluasi model regresi terbaik. Nilai *adjusted*  $R^2$  dapat naik atau turun apabila satu variabel independen ditambah ke dalam model. Apabila dalam uji empiris terdapat *adjusted*  $R^2$  bernilai negatif, maka nilai *adjusted*  $R^2$  dianggap bernilai 0 (nol).

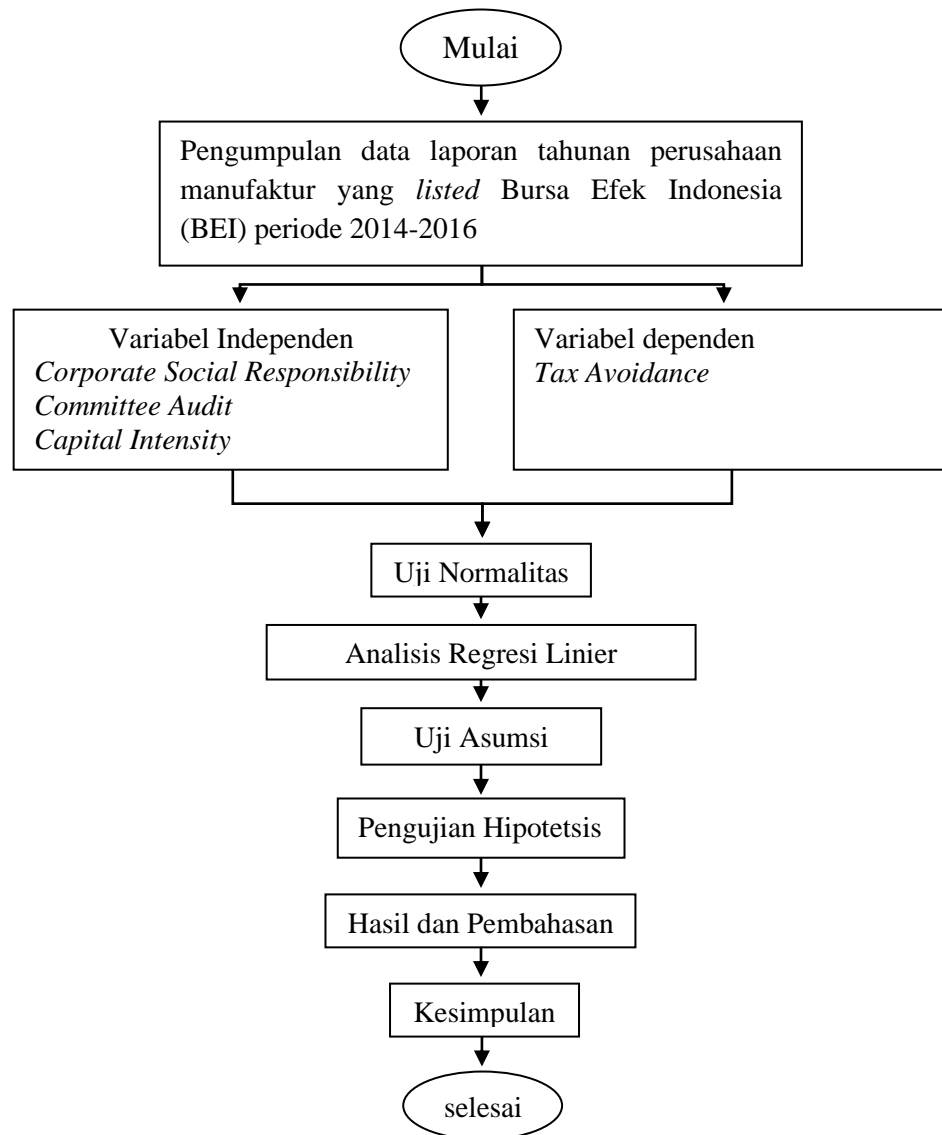
### 3.6.4. Uji Kelayakan Model (*Goodness of Fit*)

Hidayati dan Murfuah (2016) menyatakan bahwa uji kelayakan model digunakan untuk menguji  $H_0$ . Data empiris sesuai dengan model regresi, maka tidak ada perbedaan antara model dengan data sehingga data dapat dikatakan cocok atau fit. Keputusan uji kelayakan model adalah (a) jika nilai *goodness of fit statistic*  $> 0.05$  maka  $H_0$  diterima yang berarti ada perbedaan signifikan antara model dengan nilai observasinya sehingga model penelitian yang diestimasi belum layak digunakan. (b) jika nilai *goodness of fit statistic*  $< 0.05$  maka  $H_0$  ditolak yang berarti model mampu memprediksi nilai obeservasinya sehingga model penelitian yang diestimasi layak digunakan.

### 3.6.5. Uji t

Uji t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual menerangkan variasi variabel terikat (Ghozali, 2016). Uji t dengan asumsi bahwa variabel independen dianggap konstan. Uji statistik t dilakukan dengan melihat nilai koefisien beta pada *output* hasil regresi menggunakan SPSS dengan *significance level* 0.05 ( $\alpha=5\%$ ). Pengambilan keputusan pada uji t adalah jika variabel yang dimasukkan dalam model regresi nilai signifikan  $> 0.05$  maka hipotesis ( $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak) diterima, yang berarti variabel mampu memprediksi nilai observasinya sehingga model penelitian belum tepat atau jika nilai signifikan  $\leq 0.05$  maka hipotesis ( $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima) diterima yang berarti variabel mampu memprediksi nilai observasinya, sehingga model penelitian sudah tepat.

### 3.7. Kerangka Pemecahan Masalah



## BAB 5. KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

### 5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh *csr*, *audit committee*, dan *capital intensity* terhadap *tax avoidance*, ditentukan dengan menggunakan metode *purposive sampling*. Berdasarkan pembahasan pada bab IV, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil pengujian regresi berganda atas variabel *corporate social responsibility* terhadap *tax avoidance* menunjukkan bahwa *corporate social responsibility* berpengaruh terhadap *tax avoidance* signifikan. Ini membuktikan bahwa semakin rendah *csr* maka aktivitas *tax avoidance* semakin tinggi. Pengungkapan *csr* yang semakin rendah secara jumlah aktivitas maupun motif pelaksanaan, sedangkan setiap perusahaan diwajibkan melakukan aktivitas sosial dan lingkungan disamping profit oriented maka perusahaan dimungkinkan melakukan tindakan non-etik lain yang itu menyangkut kepatuhan terhadap peraturan salah satunya yakni kepatuhan perpajakan. Kepedulian perusahaan yang semakin rendah akan memperbesar kemungkinan perusahaan melakukan penghindaran pajak.
2. Hasil pengujian regresi berganda atas variabel *audit committee* terhadap *tax avoidance* menunjukkan bahwa *audit committee* berpengaruh terhadap *tax avoidance* signifikan. Ini membuktikan bahwa dalam pembentukan komite audit terjadi penambahan anggota tidak memungkinkan bahwa *tax avoidance* semakin rendah. Pemenuhan syarat non afiliasi atau independen dalam pembentukan anggota komite audit, dimungkinkan hanya dimaksudkan untuk mentaati peraturan pedoman pembentukan komite audit yang diatur oleh OJK dalam Pasal 7 ayat a-k POJK No. 55/POJK.04/2015 tidak dimaksudkan untuk memastikan bahwa tidak terjadinya penyimpangan terhadap peraturan atau kepentingan *stakeholder* (pemerintah).
3. Hasil pengujian regresi berganda atas variabel *capital intensity* terhadap *tax avoidance* menunjukkan bahwa *capital intensity* berpengaruh terhadap *tax*



*avoidance* signifikan. Ini membuktikan bahwa semakin besar *capital intensity* perusahaan semakin tinggi terjadinya *tax avoidance*. Penambahan modal dalam bentuk investasi aset tetap merupakan kewenangan manajemen dalam upaya efisiensi penggunaan modal. Akan tetapi aktivitas investasi aset tetap akan memberbesar biaya penyusutan dan memperkecil penghasilan kena pajak.

## **5.2 Keterbatasan**

- 1) Hasil penelitian hanya dapat menggambarkan perilaku Wajib Pajak pada sektor manufaktur. Tidak dapat menjadi gambaran umum perilaku WP Badan perusahaan *go-public* di Indonesia.
- 2) Variabel independen yang digunakan, hanya mampu menjelaskan 55,1% saja. Jadi masih 44,9% dijelaskan oleh variabel lain.

## **5.3 Saran**

1. Bagi peneliti selanjutnya, sebaiknya memperluas sampel perusahaan-perusahaan seluruh sektor yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Supaya dapat dijadikan gambaran umum perilaku Wajib Pajak Badan yang telah *go-public* di Indonesia.
2. Bagi galery Bursa Efek Indonesia Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember, supaya menyediakan data lengkap mengenai laporan tahunan perusahaan yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia.



## DAFTAR PUSTAKA

- Ardyansah, D. dan Zulaikha. 2014. *Pengaruh Size, Leverage, Profitability, Capital Intensity Ratio dan Komisaris Independen Terhadap Effective Tax Rate*. Universitas Diponegoro
- Andi, W. 2010. *Pengaruh Corporate Governace dan Konsentrasi Kepemilikan Terhadap Daya Informasi Akuntansi*. Sposium Nasional Akuntansi Xiii.
- Col, B. dan S. Patel. 2016. *Going To Haven?Corporate Social Responsibility And Tax Avoidance*.
- Diantari, P. R. dan Ulupui, I. A. 2016. *Pengaruh Komite Audit, Proporsi Komisaris Independen dan Proporsi Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance*. Universitas Udayana.
- Epstein, M. J. dan M. Freedman. 1994. *Social Disclosure And The Individual Investor*. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*. 7(4): 94-109.
- Fadhila, R. 2014. *Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance*. Universitas Negeri Padang
- Fajar, C. M. 2014. *Tax Law Enforcement Sebagai Upaya Optimalisasi Penerimaan Pajak Negara Ditinjau Melalui Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak*. Bandung; Universitas Bsi.
- Ghozali, I. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariate*. Semarang. Universitas Diponegoro.
- Grahovar, M. 2010. *The Role Of Corporate Social Disclousure*. Gothenburg University.
- Hanlon dan Heitzman. 2010. *A Review Of Tax Avoidance*. *Journal Of Accounting dan Economics Confrence*.

- Hidayatul, N. dan Fidiana. 2017. *Pengaruh Corporate Social Responsibility dan Good Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak*. Stie Surabaya.
- Indiarto dan Supomo. 2016. *Metodologi Penelitian Bisnis: Untuk Akuntansi & Manajemen*. Bpfe. Yogyakarta.
- Jatmiko, A. M. 2012. *Peningkatan Tax Ratio Sebagai Upaya Mewujudkan Kemandirian Dalam Pembiayaan Negara*. Jurnal.
- Lanis, R. dan G. Richardson. 2015. *Is Corporate Social Responsibility Performance Associated With Tax Avoidance*. Springer Science.
- Latif, A. B. 2004. *Reformasi Pajak Menuju Kemandirian Bangsa*. Jurnal Dinamika Ekonomi dan Bisnis. Vol. 1(2).
- Mangoting, Y. 2009. *Tax Planning: Sebuah Pengantar Sebagai Alternatif Meminimalkan Pajak*. Jurnal Akuntansi dan Keuangan. Mei. Vol 1(2).
- Marfuah dan Y. D. Cahyono. 2011. *Karakteristik Perusahaan dan Pengungkapan Tanggungjawab Social*. Universitas Islam Indonesia.
- Masri, M., dan Martani. 2013. *Pengaruh Tax Avoidance Terhadap Cost Of Debt*.
- Miqdad, M. 2013. *Praktik Tata Kelola Perusahaan (Corporate Governance) dan Usefulness Informasi Akuntansi (Telaah Teoritis dan Empiris)*. Universitas Jember.
- Muzakki, M. R., dan Darsono. 2015. *Pengaruh Corporate Social Responsibility dan Capital Intensity Terhadap Penghindaran Pajak*. Universitas Diponegoro.
- Nugroho, A. D. 2009. *Anti-Avoidance Rules Di Indonesia Pasca Amandemen UU Pajak Penghasilan*. Universitas Gajah Mada.

- Otoritas Jasa Keuangan.2015. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/Pojk.04/2015 *Tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit*.
- Pamudji, S. dan A. Trihartati. 2010. *Pengaruh Independensi dan Efektivitas Komite Audit Terhadap Manajemen Laba*. Vol. 2(1).Jurnal Dinamika Akuntansi.
- Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). 2012. *Aset Tetap*. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 16 (Revisi 2011). Jakarta. DSAK-IAI.
- Pohan, C. A. 2013. *Optimizing Corporate Tax Management: Kajian Perpajakan dan Tax Planning Terkini*. Bumi Aksara;Jakarta.
- Putri, C. L. dan M. F. Lautina. 2016. *Pengaruh Capital Intensity Ratio, Inventory Intensity Ratio, Ownership Structure dan Profitability Terhadap Effective Tax Rate (Etr)*.
- Ratmono, D. dan W. M. Sagala. 2015. *Pengungkapan Corporate Social Responsibility (Csr) Sebagai Sarana Legitimasi: Dampaknya Terhadap Tingkat Agresivitas Pajak*. FEB. Universitas Diponegoro.
- Rusydi, M. K. 2013. *Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Aggressive Tax Avoidance Di Indonesia*. Malang;Universitas Brawijaya.
- Sembiring, E. R. 2005. *Karakteristik Perusahaan dan Pengungkapan Tanggungjawab Sosial: Studi Empiris Pada Perusahaan Yang Tercatat Di Bursa Efek Jakarta*. Simposium Nasional Akuntansi VIII.
- Sriwedari, T. 2009. *Mekanisme Good Corporate Governanc, Manajemen Laba dan, Kinerja Keuangan Perusahaan Manufaktur Di Bursa Efek Indonesia*.
- Sujarweni, V. W. 2015. *SPSS Untuk Penelitian*. Pustakan Baru Press;Yogyakarta.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Alfabeta;Bandung.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007. *Perseroan Terbatas*. 16 Agustus 2007. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2008. Perubahan Ke-Empat UU No. 7/1983 *Tentang Pajak Penghasilan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133. Jakarta.

Wahyudi, D. 2015. *Analisis Empiris Pengaruh Aktifitas Corporate Social Responsibility (CSR) terhadap Penghindaran Pajak di Indonesia*. Tax Education and Training Center. Jakarta Barat.

Wijayanti, A., A. Wijayanti., dan Y.C. Samrotun. 2016. *Pengaruh Karakteristik Perusahaan, GCG, Dan CSR Terhadap Penghindaran Pajak*. Universitas Islam Batik Surakarta. Surakarta.

Winata, F. 2014. *Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013*. *Tax & Accounting Review*. Vol:4;1. Universitas Kristen Petra.

Yudarwati, G. A. 2011. *Corporate Social Responsibility And Public Relations Practice: Case Studies From The Indonesian Mining Industry*. Universitas Rmit.

[www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id)

[www.pajak.co.id](http://www.pajak.co.id)

[www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)

**Lampiran 1. Alat Ukur Penghindaran Pajak (Hanlon dan Heitzman, 2010)**

No.	Pengukuran	Cara menghitung	Keterangan
1	ETR	<i>Worldwide total income tax expense worldwide total pre-tax accounting income</i>	<i>Total tax expense pre-tax income</i>
2	Current ETR	<i>Worldwide total income tax expense Worldwide total pre-tax accounting income</i>	<i>Current tax expense of pre-tax book income</i>
3	Cash ETR (CETR)	<i>Worldwide cash taxes paid Worldwide total pre-tax accounting income</i>	<i>Cash taxes paid of pre-tax book income</i>
4	Long-run Cash ETR	$\sum$ <i>Worldwide cash taxes paid</i> $\sum$ <i>Worldwide total pre-tax accounting income</i>	<i>Sum of cash taxes paid over n years divided by the sum of pre-tax earning over n years</i>
5	ETR differential	<i>Statutory ETR – GAAP ETR</i>	<i>The difference of between the statutory ETR and firm's GAAP ETR</i>
6	DTAX	<i>Error term form the following regression :ETR differential x Pre-tax book income = a + bx control + e</i>	<i>Tihe unexplained portion of the ETR differential</i>
7	Total BTD	<i>Total different book – Tax total assets</i>	<i>The total different between book and taxable income</i>
8	Temporary BTD	<i>Defferd tax expense/ U.S STR</i>	<i>The total different between book and taxable income</i>
9	Abnormal Total BTD	<i>Residual fram BTD/Tait = <math>\beta</math>TAit + <math>\beta</math>mi</i>	<i>A measure of unexplained total book-tax differences</i>

10	<i>Unrecognized tax benefits</i>	<i>Discloused amount post-FIN 48</i>	<i>Tax liability accrued for taxes not yet paid on uncertain positions</i>
11	<i>Tax shelter activity</i>	<i>Indicator variable for firm's accused of engaging in a tax shelter</i>	<i>Firm's identified via firm disclousure, the press, or IRS confidential data</i>
12	<i>Marginal tax rate</i>	<i>Simulated marginal tax rate</i>	<i>Present value of taxes on an additional dollar of income</i>



## Lampiran 2. Daftar nama perusahaan sampel

No.	Kode Saham	Nama Perusahaan Manufaktur
1	WTON	PT. Wijaya Karya Beton Tbk.
2	SMR	PT. Semen Baturaja (Persero) Tbk
3	SMGR	PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk
4	INTP	PT. Indocement Tunggul Prakarsa Tbk
5	AMFG	PT. Asahimas Flat Glass Tbk
6	TOTO	PT. Surya Toto Indonesia Tbk
7	ARNA	PT. Arwana Citramulia Tbk
8	INAI	PT Indal Aluminium Industri Tbk
9	ISSP	PT. Steel Pipe Industry of Indonesia Tbk
10	LION	PT. Lion Metal Works Tbk
11	LMSH	PT. Lionmesh Prima Tbk
12	PICO	PT. Pelangi Indah Canindo Tbk
13	BUDI	PT. Budi Starch & Sweetener Tbk
14	INCI	PT. Intanwijaya International Tbk
15	EKAD	PT. Ekadharm international Tbk
16	SRSN	PT. Indo Acidatama Tbk
17	IMPC	PT. Impack Pratama Industri Tbk
18	IPOL	PT. Indopoly Swakarsa Industry Tbk.
19	IGAR	PT. Champion Pasific Indonesia Tbk
20	APLI	PT. Asiaplast Industries Tbk
21	CPIN	PT. Charoen Pokphand Indonesia Tbk
22	JPFA	PT. Japfa Comfeed Indonesia Tbk
23	KDSI	PT. Kedawung Setia Industrial Tbk

24	ALDO	PT. Alkindo Naratama Tbk
25	BRAM	PT. Indo Kordsa Tbk
26	AUTO	PT. Astra Otopars Tbk
27	ASII	PT. Astra International Tbk
28	INDS	PT. Indospring Tbk
29	NIPS	PT. Nipress Tbk
30	SMSM	PT. Selamat Sempurna Tbk
31	PBRX	PT. Pan Brothers Tbk
32	ERTX	PT. Eratex Djaja Tbk
33	SRIL	PT. Sri Rejeki Isman Tbk
34	UNIT	PT. Nusantara Inti Corpora Tbk
35	TRIS	PT. Trisula International Tbk
36	RICY	PT. Ricky Putra Globalindo Tbk
37	BATA	PT. Sepatu Bata Tbk
38	KBLM	PT. Kabelindo Murni Tbk
39	KBLI	PT. KMI Wire and Cable Tbk
40	SCCO	PT. Supreme Cable Manufacturing & Commerce Tbk
41	SKLT	PT. Sekar Laut Tbk
42	SKBM	PT. Sekar Bumi Tbk
43	MLBI	PT. Multi Bintang Indonesia Tbk
44	STTP	PT. Siantra Top Tbk
45	ULTJ	PT. Ultrajaya Milk Industry & Trading Company Tbk
46	INDF	PT. Indofood Sukses Makmur Tbk
47	ROTI	PT. Nippon Indosari Corpindo Tbk
48	ICBP	PT. Indofood CBP Sukses Makmur Tbk

49	DLTA	PT. Delta Djakarta Tbk
50	AISA	PT. Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk
51	GGRM	PT. Gudang Garam Tbk
52	HMSP	PT. Hanjaya Mandala Sepurna Tbk
53	WIIM	PT. Wismilak Inti Makmur Tbk
54	DVLA	PT. Darya-Varia Laboratoria Tbk
55	KAEF	PT. Kimia Farma (Persero) Tbk
56	KLBF	PT. Kalbe Farma Tbk
57	MERK	PT. Merck Tbk
58	PYFA	PT. Pyridam Farma Tbk
59	SIDO	PT. Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk
60	TSPC	PT. Tempo Scan Pacific Tbk
61	ADES	PT. Akasha Wira International Tbk
62	TCID	PT. Mandom Indonesia Tbk
63	UNVR	PT. Unilever Indonesia Tbk
64	CINT	PT. Chitose International Tbk
65	WOOD	PT. Intergra Indocabinet Tbk

Sumber : Data diolah, 2019

**Lampiran 3. Item-item Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Manufaktur Menurut Sembiring (2005).**

No.	Kategori	Manufacturing
	<b>Lingkungan</b>	
1	Pengendalian polusi kegiatan operasi, pengeluaran riset dan pengembangan untuk pengurangan polusi	Y
2	Pernyataan yang menunjukkan bahwa operasi perusahaan tidak mengakibatkan polusi atau memenuhi ketentuan hukum dan peraturan polusi	Y
3	Pernyataan yang menunjukkan bahwa polusi operasi telah atau akan ditanggulangi	Y
4	Pencegahan atau perbaikankerusakan lingkungan akibat pengelolaan sumber daya alam, misal reklamasi atau reboisasi	Y
5	Konservasi sumber alam, misal mendaur ulang kaca, besi, minyak, air, dan kertas	Y
6	Penggunaan material daur ulang	Y
7	Menerima penghargaan berkaitan dengan program lingkungan yang diadakan oleh perusahaan	Y
8	Merancang fasilitas yang harmonis dengan lingkungan	Y
9	kontribusi dalam seni yang bertujuan untuk memperindah lingkungan	Y
10	Kontribusi dalam pemugaran bangunan sejarah	Y
11	Pengelolaan limbah	Y
12	Memperelajari dampak lingkungan untuk memonitor dampak lingkungan perusahaan	Y
13	Perlindungan lingkungan hidup	Y
	<b>Energi</b>	
1	Menggunakan energi secara lebih efisien dalam kegiatan operasi	Y
2	Memanfaatkan barang bekas untuk memproduksi enegi	Y
3	Mengungkapkan penghematan energi sebagai hasil produk daur ulang	Y
4	Membahas upaya perusahaan dalam mengurangi konsumsi energi	Y
5	Pengungkapan peningkatan efisiensi energi dan produk	Y
6	Riset yang mengarah pada peningkatan efisiensi energi dan produk	Y
7	Mengungkapkan kebijakan energi perusahaan	Y

	<b>Kesehatan dan Keselamatan Tenaga Kerja</b>	
1	Mengurangi polusi, iritasi, atau resiko dalam lingkungan kerja	Y
2	Mempromosikan keselamatan tenaga kerja dan kesehatan fisik atau mental	Y
3	Mengungkapkan statistik kecelakaan kerja	Y
4	Mentaati peraturan standar kesehatan dan keselamatan kerja	Y
5	Menerima penghargaan berkaitan dengan keselamatan kerja	Y

6	Menetapkan suatu komite keselamatan kerja	Y
7	Melaksanakan riset untuk meningkatkan keselamatan kerja	Y
8	Mengungkapkan pelayanan kesehatan tenaga kerja	Y
	<b>Lain-lain Tentang Tenaga Kerja</b>	
1	Perekrutan atau memanfaatkan tenaga kerja wanita atau orang cacat	Y
2	Mengungkapkan persentase atau jumlah tenaga kerja wanita atau orang cacat dalam tingkat managerial	Y
3	Mengungkapkan tujuan penggunaan tenaga kerja wanita atau orang cacat dalam pekerjaan	Y
4	Program dalam kemajuan tenaga kerja wanita atau orang cacat	Y
5	Pelatihan tenaga kerja melalui program tertentu di tempat kerja	Y
6	Memberi bantuan terhadap tenag kerja dalam bidang pendidikan	Y
7	Mendirikan suatu pusat pelatihan tenaga kerja	Y
8	Mengungkapkan bantuan atau bimbingan untuk tenaga kerja yang dalam proses mengundurkan diri atau telah berbuat kesalahan	Y
9	Mengungkapkan perencanaan kepemilikan rumah karyawan	Y
10	Mengungkapkan fasilitas untuk rekreasi	Y
11	Pengungkapan presentase gaji untuk pensiun	Y
12	Mengungkapkan kebijakan penggajian dalam operasi perusahaan	Y
13	Mengungkapkan jumlah tenaga kerja perusahaan	Y
14	Mengungkapkan tingkat manajerial yang ada	Y
15	Mengungkapkan disposisi staf dimana staf ditempatkan	Y
16	Mengungkapkan jumlah staf, masa kerja, dan kelompok usia mereka	Y
17	Mengungkapkan statistik tenaga kerja, misal penjualan per tenaga kerja	Y
18	Mengungkapkan kualifikasi tenaga kerja yang direkrut	Y
19	Mengungkapkan rencana kepemilikan saham oleh tenaga kerja	Y
20	Mengungkapkan rencana pembagian keuntungan lain	Y
21	Mengungkapkan informasi hubungan manajemen dengan tenaga kerja dalam meningkatkan kepuasan dan motivasi kerja.	Y
22	Mengungkapkan informasi stabilitas pekerjaan tenaga kerja dan masa depan perusahaan	Y
23	Membuat laporan tenaga kerja yang terpisah	Y
24	Melaporkan hubungan perusahaan dengan serikat buruh	Y
25	Melaporkan gangguan dan aksi tenaga kerja	Y
26	Mengungkapkan informasi bagaimana aksi tenaga kerja di negosiasikan	Y
27	Peningkatan kondisi kerja secara umum	Y
28	Informasi re-organisasi perusahaan memengaruhi tenaga kerja	Y
29	Informasi dan statistik perputaran tenaga kerja	Y
	<b>Produk</b>	
1	Pengungkapan informasi pengembangan produk perusahaan,	Y

	termasuk pengemasannya	
2	Gambaran pengeluaran riset dan pengembangan produk	Y
3	Pengungkapan informasi proyek riset perusahaan untuk memperbaiki produk	Y
4	Pengungkapan bahan produk memenuhi standar keselamatan	Y
5	Membuat produk lebih aman untuk konsumen	Y
6	Melaksanakan riset atas peningkatan keselamatan produk	Y
7	Pengungkapan peningkatan kebersihan atau kesehatan dalam pengelolaan dan penyiapan produk	Y
8	Pengungkapan informasi atas keselamatan produk	Y
9	Pengungkapan informasi mutu produk yang dicerminkan dalam penerimaan penghargaan	Y
10	Informasi yang dapat diverifikasi bahwa mutu produk telah meningkat (ISO 9000)	Y
	<b>Keterlibatan Masyarakat</b>	
1	Sumbangan tunai, produk, layanan untuk mendukung aktivitas masyarakat, pendidikan, dan seni	Y
2	Tanaga kerja paruh waktu dari mahasiswa atau pelajar	Y
3	Sebagai sponsor untuk proyek kesehatan masyarakat	Y
4	Membantu riset medis	Y
5	Sebagai sponsor untuk konferensi pendidikan, seminar, atau pameran seni	Y
6	Membiayai program beasiswa	Y
7	Membuka fasilitas perusahaan untuk masyarakat	Y
8	Mensponsori kampanye nasional	Y
9	Mendukung pengembangan industri lokal	Y
	<b>Umum</b>	
1	Pengungkapan tujuan atau kebijakan perusahaan secara umum berkaitan dengan tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat	Y
2	Informasi berhubungan dengan tanggung jawab sosial perusahaan selain yang disebutkan diatas	Y
	<b>Total Item-item Pengungkapan</b>	<b>78</b>

Sumber: Sembiring (2005)

**Lampiran 4. Rekapitulasi Data Nilai Luas Pengungkapan Tanggung Jawab  
Sosial Perusahaan Sampel**

No.	Sektor Industri	Kode Saham	2014		2015		2016	
			$\Sigma X$	CSRD	$\Sigma X$	CSRD	$\Sigma X$	CSRD
1	Sektor 3	WTON	46	0,59	46	0,59	46	0,59
2		SMBR	40	0,56	40	0,56	44	0,56
3		SMGR	45	0,62	45	0,62	48	0,62
4		INTP	45	0,58	45	0,58	45	0,58
5		AMFG	30	0,44	30	0,44	34	0,44
6		TOTO	33	0,42	33	0,42	33	0,42
7		ARNA	28	0,36	28	0,36	28	0,36
8		INAI	21	0,27	21	0,27	21	0,27
9		ISSP	27	0,35	27	0,35	27	0,35
10		LION	30	0,38	30	0,38	30	0,38
11		LMSH	24	0,31	24	0,31	24	0,31
12		PICO	20	0,26	20	0,26	20	0,26
13		BUDI	33	0,42	33	0,42	33	0,42
14		INCI	19	0,24	19	0,24	19	0,24
15		EKAD	23	0,29	23	0,29	23	0,29
16		SRSN	38	0,49	38	0,49	38	0,49
17		IMPC	37	0,47	37	0,47	37	0,47
18		IPOL	42	0,54	42	0,54	42	0,54
19		IGAR	24	0,31	24	0,31	24	0,31
20		APLI	22	0,28	22	0,28	22	0,28
21		CPIN	22	0,28	22	0,28	22	0,28
22		JPFA	40	0,51	40	0,51	40	0,51
23		KDSI	16	0,21	16	0,21	16	0,21
24		ALDO	27	0,35	27	0,35	27	0,35
25	Sektor 4	BRAM	35	0,49	35	0,49	35	0,49
26		AUTO	30	0,42	30	0,42	30	0,42
27		ASII	35	0,49	35	0,49	35	0,49
28		INDS	24	0,34	24	0,34	24	0,34
29		NIPS	19	0,27	19	0,27	19	0,27
30		SMSM	24	0,34	24	0,34	24	0,34
31		PBRX	24	0,34	24	0,34	24	0,34
32		ERTX	30	0,42	30	0,42	30	0,42
33		SRIL	30	0,42	30	0,42	30	0,42
34		UNIT	20	0,28	20	0,28	20	0,28
35		TRIS	27	0,38	27	0,38	27	0,38
36		RICY	29	0,41	29	0,41	29	0,41

37		BATA	17	0,24	17	0,24	17	0,24
38		KBLM	29	0,41	29	0,41	29	0,41
39		KBLI	29	0,41	29	0,41	29	0,41
40		SCCO	26	0,37	26	0,37	26	0,37
41	Sektor 5	SKLT	31	0,40	31	0,40	31	0,40
42		SKBM	20	0,26	20	0,26	20	0,26
43		MLBI	31	0,40	31	0,40	31	0,40
44		STTP	21	0,27	21	0,27	21	0,27
45		ULTJ	32	0,41	32	0,41	32	0,41
46		INDF	31	0,40	31	0,40	31	0,40
47		ROTI	33	0,42	33	0,42	33	0,42
48		ICBP	37	0,47	37	0,47	37	0,47
49		DLTA	27	0,34	27	0,34	27	0,34
50		AISA	34	0,46	34	0,46	34	0,46
51		GGRM	18	0,23	18	0,23	18	0,23
52		HMSP	41	0,52	41	0,52	41	0,52
53		WIIM	38	0,49	38	0,49	38	0,49
54		DVLA	37	0,47	37	0,47	37	0,47
55		KAEF	45	0,58	45	0,58	45	0,58
56		KLBF	45	0,58	45	0,58	45	0,58
57		MERK	46	0,59	46	0,59	46	0,59
58		PYFA	45	0,58	45	0,58	45	0,58
59		SIDO	41	0,53	41	0,53	41	0,53
60		TSPC	26	0,33	26	0,33	26	0,33
61		ADES	25	0,32	25	0,32	25	0,32
62		TCID	33	0,42	33	0,42	33	0,42
63		UNVR	45	0,58	45	0,58	45	0,58
64		CINT	26	0,33	26	0,33	26	0,33
65		WOOD	35	0,45	35	0,45	35	0,45

Sumber; Data diolah, 2019



### Lampiran 5. Rekapitulasi Data *Audit Commitee* Perusahaan Sampel

No.	Kode Saham	2014			2015			2016		
		Jml Angg.	Anggota Indep.	Rasio	Jml Angg.	Anggota Indep.	Rasio	Jml Angg.	Anggota Indep.	Rasio
1	WTON	3	2	0,67	3	2	0,67	3	2	0,67
2	SMBR	3	2	0,67	3	2	0,67	3	2	0,67
3	SMGR	4	3	0,75	4	3	0,75	4	3	0,75
4	INTP	3	2	0,67	3	2	0,67	3	2	0,67
5	AMFG	3	2	0,67	3	2	0,67	3	2	0,67
6	TOTO	3	2	0,67	3	2	0,67	3	2	0,67
7	ARNA	4	3	0,75	4	3	0,75	4	3	0,75
8	INAI	3	2	0,67	3	2	0,67	3	2	0,67
9	ISSP	3	2	0,67	3	2	0,67	3	2	0,67
10	LION	3	2	0,67	3	2	0,67	3	2	0,67
11	LMSH	3	2	0,67	3	2	0,67	3	2	0,67
12	PICO	3	2	0,67	3	2	0,67	3	2	0,67
13	BUDI	3	2	0,67	3	2	0,67	3	2	0,67
14	INCI	3	2	0,67	3	2	0,67	3	2	0,67
15	EKAD	3	2	0,67	3	2	0,67	3	2	0,67
16	SRSN	3	2	0,67	3	2	0,67	3	2	0,67
17	IMPC	3	2	0,67	3	2	0,67	3	2	0,67
18	IPOL	3	2	0,67	3	2	0,67	3	2	0,67
19	IGAR	3	2	0,67	3	2	0,67	3	2	0,67
20	APLI	3	2	0,67	3	2	0,67	3	2	0,67
21	CPIN	3	2	0,67	3	2	0,67	3	2	0,67
22	JPFA	3	2	0,67	3	2	0,67	3	2	0,67
23	KDSI	3	2	0,67	3	2	0,67	3	2	0,67
24	ALDO	3	2	0,67	3	2	0,67	3	2	0,67
25	BRAM	3	2	0,67	3	2	0,67	3	2	0,67
26	AUTO	3	2	0,67	3	2	0,67	3	2	0,67
27	ASII	3	2	0,67	3	2	0,67	3	2	0,67
28	INDS	3	2	0,67	3	2	0,67	3	2	0,67
29	NIPS	3	2	0,67	3	2	0,67	3	2	0,67
30	SMSM	3	2	0,67	3	2	0,67	3	2	0,67
31	PBRX	3	2	0,67	3	2	0,67	3	2	0,67
32	ERTX	3	2	0,67	3	2	0,67	3	2	0,67
33	SRIL	3	2	0,67	3	2	0,67	3	2	0,67
34	UNIT	3	2	0,67	3	2	0,67	3	2	0,67
35	TRIS	3	2	0,67	3	2	0,67	3	2	0,67
36	RICY	3	2	0,67	3	2	0,67	3	2	0,67
37	BATA	3	2	0,67	3	2	0,67	3	2	0,67

38	KBLM	3	2	0,67	3	2	0,67	3	2	0,67
39	KBLI	3	2	0,67	3	2	0,67	3	2	0,67
40	SCCO	3	2	0,67	3	2	0,67	3	2	0,67
41	SKLT	3	2	0,67	3	2	0,67	3	2	0,67
42	SKBM	3	2	0,67	3	2	0,67	3	2	0,67
43	MLBI	3	2	0,67	3	2	0,67	3	2	0,67
44	STTP	3	2	0,67	3	2	0,67	3	2	0,67
45	ULTJ	3	2	0,67	3	2	0,67	3	2	0,67
46	INDF	3	2	0,67	3	2	0,67	3	2	0,67
47	ROTI	3	2	0,67	3	2	0,67	3	2	0,67
48	ICBP	3	2	0,67	3	2	0,67	3	2	0,67
49	DLTA	3	2	0,67	3	2	0,67	3	2	0,67
50	AISA	3	2	0,67	3	2	0,67	3	2	0,67
51	GGRM	3	2	0,67	3	2	0,67	3	2	0,67
52	HMSP	3	2	0,67	3	2	0,67	3	2	0,67
53	WIIM	3	2	0,67	3	2	0,67	3	2	0,67
54	DVLA	3	2	0,67	3	2	0,67	3	2	0,67
55	KAEF	3	2	0,67	3	2	0,67	3	2	0,67
56	KLBF	3	2	0,67	3	2	0,67	3	2	0,67
57	MERK	3	2	0,67	3	2	0,67	3	2	0,67
58	PYFA	3	2	0,67	3	2	0,67	3	2	0,67
59	SIDO	3	2	0,67	3	2	0,67	3	2	0,67
60	TSPC	3	2	0,67	3	2	0,67	3	2	0,67
61	ADES	3	2	0,67	3	2	0,67	3	2	0,67
62	TCID	3	2	0,67	3	2	0,67	3	2	0,67
63	UNVR	3	2	0,67	3	2	0,67	3	2	0,67
64	CINT	3	2	0,67	3	2	0,67	3	2	0,67
65	WOOD	3	2	0,67	3	2	0,67	3	2	0,67

Sumber : Data diolah, 2019

**Lampiran 6.1. Rekapitulasi Data *Capital Intensity* Perusahaan Sampel Tahun  
2014**

<b>No.</b>	<b>Kode Saham</b>	<b>Aset Tetap (Rp.000)</b>	<b>Penjualan (Rp.000)</b>	<b>CI</b>
1	WTON	2.016.731.229,01	3.277.195.052,16	0,615
2	SMBR	1.202.538.316,00	1.214.914.932,00	0,990
3	SMGR	30.338.546.988,00	26.987.035.135,00	1,124
4	INTP	21.442.411.000,00	19.996.264.000,00	1,072
5	AMFG	3.724.104.000,00	3.672.186.000,00	1,014
6	TOTO	1.430.190.686,82	2.053.630.374,08	0,696
7	ARNA	1.194.752.426,58	1.609.758.677,69	0,742
8	INAI	277.212.540,98	933.462.438,26	0,297
9	ISSP	1.591.116.000,00	3.367.873.000,00	0,472
10	LION	164.045.819,72	377.622.622,15	0,434
11	LMSH	55.522.994,77	249.072.012,37	0,223
12	PICO	414.997.521,01	694.332.286,64	0,598
13	BUDI	2.639.537.000,00	2.284.211.000,00	1,156
14	INCI	160.454.227,21	110.023.088,70	1,458
15	EKAD	163.022.824,09	526.573.620,06	0,310
16	SRSN	327.043.647,00	472.834.591,00	0,692
17	IMPC	567.051.771,45	1.413.257.059,36	0,401
18	IPOL	3.681.278.786,08	2.857.320.038,64	1,288
19	IGAR	187.812.443,42	737.863.227,41	0,255
20	APLI	347.039.008,54	294.081.114,20	1,180
21	CPIN	11.390.539.000,00	29.150.275.000,00	0,391
22	JPFA	9.204.467.000,00	24.458.880.000,00	0,376
23	KDSI	682.124.122,67	1.394.909.156,73	0,489
24	ALDO	2.018.488.493,56	6.143.890.306,73	0,329
25	BRAM	5.691.963.263,48	2.584.000.052,24	2,203
26	AUTO	4.983.516.000,00	12.255.427.000,00	0,407
27	ASII	74.895.000.000,00	201.701.000.000,00	0,371
28	INDS	1.338.948.773,69	1.866.977.260,11	0,717
29	NIPS	630.135.571,00	1.015.868.035,00	0,620
30	SMSM	1.688.031.000,00	2.632.860.000,00	0,641
31	PBRX	1.547.356.353,96	4.211.303.770,48	0,367
32	ERTX	351.856.094,88	677.145.076,96	0,520
33	SRIL	5.483.555.433,44	7.328.272.447,00	0,748
34	UNIT	487.940.066,96	102.448.044,30	4,763
35	TRIS	232.058.690,99	746.828.922,73	0,311
36	RICY	563.241.432,16	1.185.443.580,24	0,475
37	BATA	441.535.732,00	1.008.727.515,00	0,438
38	KBLM	498.409.002,00	919.537.870,59	0,542
39	KBLI	854.373.987,60	2.384.078.038,24	0,358
40	SCCO	662.453.721,12	3.703.267.949,29	0,179
41	SKLT	218.093.190,19	681.419.524,16	0,320

42	SKBM	328.932.477,76	1.480.764.903,72	0,222
43	MLBI	2.065.845.000,00	2.988.501.000,00	0,691
44	STTP	1.334.419.651,96	2.170.464.194,35	0,615
45	ULTJ	2.016.520.204,41	3.916.789.366,42	0,515
46	INDF	33.884.478.000,00	63.594.452.000,00	0,533
47	ROTI	1.985.325.369,19	1.880.262.901,70	1,056
48	ICBP	9.182.705.000,00	30.022.463.000,00	0,306
49	DLTA	435.688.998,00	2.111.639.244,00	0,206
50	AISA	2.505.772.000,00	5.139.974.000,00	0,488
51	GGRM	28.925.682.000,00	65.185.850.000,00	0,444
52	HMSP	9.563.064.000,00	80.690.139.000,00	0,119
53	WIIM	523.509.304,61	1.661.533.200,32	0,315
54	DVLA	473.676.899,00	1.103.821.775,00	0,429
55	KAEF	1.015.617.539,78	4.521.024.379,76	0,225
56	KLBF	6.099.371.352,52	17.368.532.547,56	0,351
57	MERK	1.015.617.539,78	4.521.024.379,76	0,225
58	PYFA	155.767.874,51	222.302.407,53	0,701
59	SIDO	1.065.147.000,00	2.197.907.000,00	0,485
60	TSPC	2.363.690.958,87	7.512.115.037,59	0,315
61	ADES	7.222.000,00	578.784.000,00	0,012
62	TCID	1.529.838.298,50	2.308.203.551,97	0,663
63	UNVR	9.348.712.000,00	34.511.534.000,00	0,271
64	CINT	86.392.862,47	283.443.541,59	0,305
65	WOOD	974.642.361,97	996.105.258,87	0,978

Sumber : Data diolah, 2019

**Lampiran 6.2. Rekapitulasi Data *Capital Intensity* Perusahaan Sampel Tahun  
2015**

<b>No.</b>	<b>Kode Saham</b>	<b>Aset Tetap (Rp. 000)</b>	<b>Penjualan (Rp.000)</b>	<b>CIR</b>
1	WTON	2.433.523.228,32	2.652.622.140,21	0,917
2	SMBR	1.522.690.870,00	1.461.248.284,00	1,042
3	SMGR	36.650.972.459,00	26.948.004.471,00	1,360
4	INTP	23.963.961.000,00	17.798.055.000,00	1,346
5	AMFG	4.215.260.000,00	3.665.989.000,00	1,150
6	TOTO	1.563.872.126,38	2.278.673.871,19	0,686
7	ARNA	1.417.965.668,58	1.291.926.384,47	1,098
8	INAI	432.622.337,40	1.384.675.922,17	0,312
9	ISSP	1.908.796.000,00	3.583.541.000,00	0,533
10	LION	187.707.466,14	389.251.192,41	0,482
11	LMSH	56.141.346,96	174.598.965,94	0,322
12	PICO	415.344.656,02	699.310.599,57	0,594
13	BUDI	2.108.246.000,00	2.378.805.000,00	0,886
14	INCI	164.157.847,32	136.668.408,27	1,201
15	EKAD	163.260.517,43	531.547.606,57	0,307
16	SRSN	338.596.603,00	531.573.325,00	0,637
17	IMPC	671.276.911,29	1.147.838.378,77	0,585
18	IPOL	4.276.588.708,73	2.766.482.339,03	1,546
19	IGAR	218.566.661,30	677.331.846,04	0,323
20	APLI	367.208.158,88	260.667.211,71	1,409
21	CPIN	14.394.134.000,00	30.107.727.000,00	0,478
22	JPFA	10.196.970.000,00	25.022.913.000,00	0,408
23	KDSI	732.198.406,33	1.492.261.925,41	0,491
24	ALDO	2.581.510.306,08	7.426.719.141,08	0,348
25	BRAM	6.327.919.238,24	2.867.519.015,87	2,207
26	AUTO	5.516.269.000,00	11.723.787.000,00	0,471
27	ASII	80.714.000.000,00	184.196.000.000,00	0,438
28	INDS	1.471.556.766,20	1.659.505.639,26	0,887
29	NIPS	797.410.344,00	987.862.829,00	0,807
30	SMSM	2.006.557.000,00	2.802.942.000,00	0,716
31	PBRX	2.514.473.913,32	5.774.244.773,64	0,435
32	ERTX	397.524.514,18	954.364.779,53	0,417
33	SRIL	7.984.787.081,42	8.709.374.946,83	0,917
34	UNIT	488.104.882,96	118.260.140,70	4,127
35	TRIS	256.974.727,36	859.743.472,90	0,299
36	RICY	620.124.987,51	1.111.051.293,01	0,558
37	BATA	458.165.131,00	1.028.850.578,00	0,445
38	KBLM	518.658.892,55	967.710.339,80	0,536
39	KBLI	1.015.444.646,38	2.662.038.531,02	0,381
40	SCCO	709.510.438,63	3.533.081.041,05	0,201
41	SKLT	246.952.595,83	745.107.731,21	0,331

42	SKBM	482.991.271,01	1.362.245.580,66	0,355
43	MLBI	2.033.772.000,00	2.696.318.000,00	0,754
44	STTP	1.523.484.132,23	2.544.277.844,66	0,599
45	ULTJ	2.318.012.207,37	4.393.932.684,17	0,528
46	INDF	38.788.508.000,00	64.061.947.000,00	0,605
47	ROTI	2.233.767.649,77	2.174.501.712,90	1,027
48	ICBP	10.401.682.000,00	31.741.094.000,00	0,328
49	DLTA	445.642.159,00	1.573.137.749,00	0,283
50	AISA	3.138.529.000,00	6.010.895.000,00	0,522
51	GGRM	31.774.012.000,00	70.365.573.000,00	0,452
52	HMSP	10.343.955.000,00	89.069.306.000,00	0,116
53	WIIM	584.381.570,53	1.839.419.574,96	0,318
54	DVLA	492.321.250,00	1.306.098.136,00	0,377
55	KAEF	1.166.368.899,58	4.860.371.483,52	0,240
56	KLBF	7.014.891.309,73	17.887.464.223,32	0,392
57	MERK	1.166.368.899,58	4.860.371.483,53	0,240
58	PYFA	158.397.671,61	217.843.921,42	0,727
59	SIDO	1.304.570.000,00	2.218.536.000,00	0,588
60	TSPC	2.526.700.278,76	8.181.481.867,18	0,309
61	ADES	518.677.000,00	669.725.000,00	0,774
62	TCID	1.523.178.703,64	2.314.889.854,07	0,658
63	UNVR	10.694.019.000,00	36.484.030.000,00	0,293
64	CINT	100.280.922,04	315.229.890,33	0,318
65	WOOD	1.240.560.194,23	1.118.696.671,71	1,109

Sumber : Data diolah, 2019

**Lampiran 6.3. Rekapitulasi Data *Capital Intensity* Perusahaan Sampel Tahun  
2016**

<b>No.</b>	<b>Kode Saham</b>	<b>Aset Tetap (Rp.000)</b>	<b>Penjualan (Rp.000)</b>	<b>CIR</b>
1	WTON	2.792.285.524,70	4.717.150.071,78	0,592
2	SMBR	4.306.578.370,00	1.522.808.093,00	2,828
3	SMGR	44.440.820.879,00	26.134.306.138,00	1,700
4	INTP	25.716.065.000,00	15.361.894.000,00	1,674
5	AMFG	6.113.997.000,00	3.724.075.000,00	1,642
6	TOTO	1.658.259.582,88	2.069.017.643,71	0,801
7	ARNA	1.488.662.204,90	1.511.978.367,22	0,985
8	INAI	454.750.646,04	1.284.510.320,66	0,354
9	ISSP	2.020.647.000,00	3.259.200.000,00	0,620
10	LION	20.649.358,69	379.137.149,04	0,054
11	LMSH	92.422.001,85	157.855.084,04	0,585
12	PICO	420.398.436,02	705.730.705,04	0,596
13	BUDI	2.282.343.000,00	2.467.553.000,00	0,925
14	INCI	252.422.950,25	176.067.561,64	1,434
15	EKAD	425.111.494,54	568.638.832,58	0,748
16	SRSN	443.419.422,00	500.539.668,00	0,886
17	IMPC	950.448.662,65	1.135.296.191,55	0,837
18	IPOL	4.176.925.408,07	2.628.441.107,05	1,589
19	IGAR	230.851.004,29	792.794.834,77	0,291
20	APLI	443.081.638,16	319.727.703,68	1,386
21	CPIN	15.063.560.000,00	38.256.857.000,00	0,394
22	JPFA	9.125.064.000,00	27.063.310.000,00	0,337
23	KDSI	745.509.034,67	1.995.337.146,83	0,374
24	ALDO	2.594.766.362,83	8.954.208.049,13	0,290
25	BRAM	6.089.480.822,49	2.959.936.813,12	2,057
26	AUTO	6.026.571.000,00	12.806.867.000,00	0,471
27	ASII	85.751.000.000,00	181.084.000.000,00	0,474
28	INDS	1.484.542.222,11	1.383.084.156,15	1,073
29	NIPS	745.080.937,00	1.039.635.856,00	0,717
30	SMSM	2.042.214.000,00	2.879.876.000,00	0,709
31	PBRX	2.656.273.337,66	6.478.895.080,32	0,410
32	ERTX	439.230.055,13	947.977.665,24	0,463
33	SRIL	9.097.731.758,37	9.135.666.987,64	0,996
34	UNIT	488.104.882,96	104.109.821,50	4,688
35	TRIS	257.631.986,45	901.909.489,24	0,286
36	RICY	652.392.932,10	1.221.519.096,81	0,534
37	BATA	468.814.010,00	999.802.379,00	0,469
38	KBLM	468.881.756,90	987.409.109,47	0,475
39	KBLI	1.041.340.687,65	2.812.196.217,45	0,370
40	SCCO	742.464.219,68	3.378.572.000,58	0,220
41	SKLT	414.363.388,93	833.850.372,88	0,497

42	SKBM	482.991.271,01	1.501.115.928,45	0,322
43	MLBI	2.220.942.000,00	3.263.311.000,00	0,681
44	STTP	1.705.482.646,69	2.629.107.367,90	0,649
45	ULTJ	2.349.396.360,18	4.685.987.917,36	0,501
46	INDF	41.330.102.000,00	66.750.317.000,00	0,619
47	ROTI	2.349.810.379,39	2.521.920.968,21	0,932
48	ICBP	41.330.102.000,00	66.659.484.000,00	0,620
49	DLTA	457.801.441,00	1.658.618.899,00	0,276
50	AISA	3.445.005.000,00	6.545.680.000,00	0,526
51	GGRM	34.229.101.000,00	76.274.147.000,00	0,449
52	HMSP	11.553.034.000,00	95.466.657.000,00	0,121
53	WIIM	618.325.384,12	1.685.795.530,62	0,367
54	DVLA	658.401.500,00	1.451.356.680,00	0,454
55	KAEF	1.547.985.137,51	5.811.502.656,43	0,266
56	KLBF	5.279.267.398,62	19.374.230.957,51	0,272
57	MERK	1.547.985.137,51	5.811.502.656,43	0,266
58	PYFA	154.231.524,18	216.951.583,95	0,711
59	SIDO	1.447.142.000,00	2.561.806.000,00	0,565
60	TSPC	2.761.679.961,19	9.138.238.993,84	0,302
61	ADES	639.919.000,00	887.663.000,00	0,721
62	TCID	1.658.350.554,34	2.526.776.164,17	0,656
63	UNVR	12.400.186.000,00	40.053.732.000,00	0,310
64	CINT	216.418.964,09	327.426.146,63	0,661
65	WOOD	1.954.192.764,15	1.323.388.979,04	1,477

Sumber : Data diolah, 2019



**Lampiran 7.1. Rekapitulasi Data *Cash Effective Tax Rate* Perusahaan Sampel  
Tahun 2014**

<b>No.</b>	<b>Kode Saham</b>	<b>Pembayaran Pajak Penghasilan (Rp. 000)</b>	<b>Laba Sebelum Pajak (Rp. 000)</b>	<b>CETR</b>
1	WTON	125.125.312,05	412.824.864,55	0,303
2	SMBR	68.964.413,00	404.809.598,00	0,170
3	SMGR	1.540.546.571,00	7.077.276.008,00	0,218
4	INTP	1.493.614.000,00	6.814.636.000,00	0,219
5	AMFG	161.705.000,00	505.163.000,00	0,320
6	TOTO	99.227.537,49	384.625.560,34	0,258
7	ARNA	99.606.289,05	348.684.411,98	0,286
8	INAI	10.666.615,44	33.183.307,82	0,321
9	ISSP	76.783.000,00	262.024.000,00	0,293
10	LION	16.086.486,39	62.857.739,32	0,256
11	LMSH	4.769.701,56	11.006.796,28	0,433
12	PICO	4.034.153,09	20.537.790,75	0,196
13	BUDI	8.127.000,00	43.419.000,00	0,187
14	INCI	389.341,90	11.486.543,97	0,034
15	EKAD	18.517.921,24	59.028.157,62	0,314
16	SRSN	8.157.747,00	30.050.062,00	0,271
17	IMPC	72.085.211,54	331.590.433,82	0,217
18	IPOL	33.226.891,68	103.994.730,20	0,320
19	IGAR	16.346.060,99	76.194.715,55	0,215
20	APLI	1.559.077,52	16.706.084,21	0,093
21	CPIN	1.008.578.000,00	2.105.972.000,00	0,479
22	JPFA	389.169.000,00	551.409.000,00	0,706
23	KDSI	15.676.932,63	59.575.756,48	0,263
24	ALDO	130.861.192,77	350.990.494,70	0,373
25	BRAM	91.025.943,12	280.125.151,56	0,325
26	AUTO	287.357.000,00	1.091.040.000,00	0,263
27	ASII	5.588.000.000,00	27.058.000.000,00	0,207
28	INDS	61.707.692,06	168.587.326,09	0,366
29	NIPS	23.676.679,00	67.494.036,00	0,351
30	SMSM	136.033.000,00	542.028.000,00	0,251
31	PBRX	54.506.954,72	160.689.644,56	0,339
32	ERTX	3.053.684,12	27.654.630,04	0,110
33	SRIL	104.278.424,40	820.155.105,48	0,127
34	UNIT	4.008.577,53	5.614.786,74	0,714
35	TRIS	21.224.951,36	48.442.710,59	0,438
36	RICY	10.657.818,76	16.199.072,00	0,658
37	BATA	34.602.558,00	99.545.892,00	0,348
38	KBLM	10.155.721,50	27.370.807,81	0,371
39	KBLI	44.409.283,47	96.415.603,21	0,461
40	SCCO	44.580.120,65	182.347.242,36	0,244

41	SKLT	6.541.475,71	24.044.381,63	0,272
42	SKBM	33.848.984,71	110.903.572,67	0,305
43	MLBI	339.888.000,00	1.078.378.000,00	0,315
44	STTP	53.340.816,26	167.977.695,75	0,318
45	ULTJ	125.695.094,34	374.957.616,09	0,335
46	INDF	2.398.644.000,00	6.340.185.000,00	0,378
47	ROTI	48.104.729,14	252.857.341,17	0,190
48	ICBP	1.106.699.000,00	3.445.380.000,00	0,321
49	DLTA	101.008.512,00	380.086.736,00	0,266
50	AISA	36.170.000,00	484.284.000,00	0,075
51	GGRM	1.651.205.000,00	7.254.713.000,00	0,228
52	HMSP	4.002.835.000,00	13.718.299.000,00	0,292
53	WIIM	62.393.629,79	150.033.454,32	0,416
54	DVLA	49.087.301,00	106.757.491,00	0,460
55	KAEF	50.181.904,24	315.611.059,64	0,159
56	KLBF	650.088.972,91	2.765.593.462,80	0,235
57	MERK	50.181.904,24	344.017.652,21	0,146
58	PYFA	1.855.509,85	4.211.187,98	0,441
59	SIDO	240.612.000,00	545.651.000,00	0,441
60	TSPC	427.737.845,36	738.305.933,71	0,579
61	ADES	10.004.000,00	41.579.000,00	0,241
62	TCID	66.871.707,44	239.428.829,61	0,279
63	UNVR	1.859.089.000,00	7.676.722.000,00	0,242
64	CINT	10.836.696,35	35.842.459,47	0,302
65	WOOD	8.291.031,94	22.384.127,64	0,370

Sumber : Data diolah, 2019

**Lampiran 7.2. Rekapitulasi Data *Cash Effective Tax Rate* Perusahaan Sampel  
Tahun 2015**

<b>No.</b>	<b>Kode Saham</b>	<b>Pembayaran Pajak Penghasilan (Rp. 000)</b>	<b>Laba Sebelum Pajak (Rp. 000)</b>	<b>CETR</b>
1	WTON	221.478.719,03	206.059.338,58	1,075
2	SMBR	62.851.654,00	443.414.252,00	0,142
3	SMGR	1.343.605.458,00	5.850.923.497,00	0,230
4	INTP	1.219.943.000,00	5.644.576.000,00	0,216
5	AMFG	152.968.000,00	464.263.000,00	0,329
6	TOTO	117.555.370,64	381.573.896,62	0,308
7	ARNA	66.524.751,00	95.514.316,42	0,696
8	INAI	17.138.228,56	57.114.061,88	0,300
9	ISSP	77.578.000,00	194.905.000,00	0,398
10	LION	11.137.150,51	58.451.801,51	0,191
11	LMSH	1.483.827,96	3.807.172,88	0,390
12	PICO	2.335.868,61	17.451.317,00	0,134
13	BUDI	22.233.000,00	52.125.000,00	0,427
14	INCI	1.926.211,80	19.220.641,87	0,100
15	EKAD	16.994.604,06	66.306.918,12	0,256
16	SRSN	9.662.769,00	20.714.663,00	0,466
17	IMPC	61.857.375,62	147.204.866,34	0,420
18	IPOL	31.585.238,93	93.502.178,92	0,338
19	IGAR	20.729.430,70	63.236.346,21	0,328
20	APLI	8.462.291,84	2.329.080,81	3,633
21	CPIN	628.226.000,00	2.281.628.000,00	0,275
22	JPFA	132.844.000,00	697.677.000,00	0,190
23	KDSI	19.198.665,23	14.890.268,27	1,289
24	ALDO	132.780.735,63	447.701.754,65	0,297
25	BRAM	71.291.621,94	252.233.132,46	0,283
26	AUTO	206.244.000,00	433.596.000,00	0,476
27	ASII	6.498.000.000,00	19.630.000.000,00	0,331
28	INDS	40.897.913,40	4.134.206,60	9,893
29	NIPS	18.212.665,00	41.752.147,00	0,436
30	SMSM	150.513.000,00	583.717.000,00	0,258
31	PBRX	99.059.136,00	158.570.903,95	0,625
32	ERTX	5.231.822,73	73.422.659,75	0,071
33	SRIL	166.558.084,80	890.945.950,30	0,187
34	UNIT	4.067.348,89	1.661.391,49	2,448
35	TRIS	16.198.187,92	50.169.354,68	0,323
36	RICY	9.769.400,08	22.627.245,19	0,432
37	BATA	38.360.968,00	148.803.618,00	0,258
38	KBLM	14.130.794,91	21.472.643,50	0,658
39	KBLI	46.086.890,64	150.049.026,30	0,307
40	SCCO	43.183.364,38	206.056.283,24	0,210

41	SKLT	15.451.631,43	27.376.238,22	0,564
42	SKBM	24.432.811,78	53.629.853,88	0,456
43	MLBI	182.909.000,00	675.572.000,00	0,271
44	STTP	51.222.193,82	232.005.398,77	0,221
45	ULTJ	111.720.131,45	700.675.250,23	0,159
46	INDF	2.333.641.000,00	4.962.984.000,00	0,470
47	ROTI	76.292.405,93	378.251.615,09	0,202
48	ICBP	1.189.923.000,00	4.009.634.000,00	0,297
49	DLTA	69.234.006,00	250.197.742,00	0,277
50	AISA	67.000.000,00	500.435.000,00	0,134
51	GGRM	1.830.188.000,00	8.635.275.000,00	0,212
52	HMSP	3.824.285.000,00	13.932.644.000,00	0,274
53	WIIM	41.390.838,94	177.962.941,78	0,233
54	DVLA	35.265.995,00	144.437.708,00	0,244
55	KAEF	68.190.694,93	354.904.735,87	0,192
56	KLBF	700.482.780,35	2.720.881.244,46	0,257
57	MERK	68.190.694,93	338.135.061,19	0,202
58	PYFA	1.605.929,78	4.554.931,10	0,353
59	SIDO	135.669.000,00	560.399.000,00	0,242
60	TSPC	457.485.911,00	707.110.932,87	0,647
61	ADES	12.688.000,00	44.175.000,00	0,287
62	TCID	52.587.296,30	583.131.947,49	0,090
63	UNVR	1.910.609.000,00	7.829.490.000,00	0,244
64	CINT	12.637.568,71	40.762.330,33	0,310
65	WOOD	9.877.880,62	42.938.779,26	0,230

Sumber : Data diolah, 2019

**Lampiran 7.3. Rekapitulasi Data *Cash Effective Tax Rate* Perusahaan Sampel  
Tahun 2016**

<b>No.</b>	<b>Kode Saham</b>	<b>Pembayaran Pajak Penghasilan (Rp. 000)</b>	<b>Laba Sebelum Pajak (Rp. 000)</b>	<b>CETR</b>
1	WTON	244.155.844,64	967.344.550,02	0,252
2	SMBR	81.103.544,00	349.280.550,00	0,232
3	SMGR	1.544.512.150,00	5.084.621.543,00	0,304
4	INTP	1.788.519.000,00	4.145.632.000,00	0,431
5	AMFG	117.634.000,00	348.561.000,00	0,337
6	TOTO	94.715.903,78	251.320.891,92	0,377
7	ARNA	30.383.985,12	123.838.299,92	0,245
8	INAI	14.661.850,49	58.097.472,99	0,252
9	ISSP	51.100.000,00	139.149.000,00	0,367
10	LION	17.898.756,42	54.671.394,70	0,327
11	LMSH	962.338,83	9.424.028,64	0,102
12	PICO	813.198,29	17.286.721,01	0,047
13	BUDI	13.513.000,00	52.832.000,00	0,256
14	INCI	3.003.783,21	13.294.748,10	0,226
15	EKAD	15.028.285,65	118.449.029,98	0,127
16	SRSN	4.898.179,00	1.688.362,00	2,901
17	IMPC	39.267.826,74	164.796.167,23	0,238
18	IPOL	34.060.501,85	138.744.946,09	0,245
19	IGAR	20.320.848,03	95.774.588,02	0,212
20	APLI	5.724.151,17	33.523.652,45	0,171
21	CPIN	425.572.000,00	3.957.250.000,00	0,108
22	JPFA	419.397.000,00	2.766.591.000,00	0,152
23	KDSI	7.916.973,24	63.697.916,13	0,124
24	ALDO	139.694.365,01	454.772.663,51	0,307
25	BRAM	89.711.365,84	417.021.919,14	0,215
26	AUTO	89.940.000,00	648.907.000,00	0,139
27	ASII	5.426.000.000,00	22.253.000.000,00	0,244
28	INDS	23.927.426,32	49.556.357,33	0,483
29	NIPS	22.017.708,00	88.566.134,00	0,249
30	SMSM	135.020.000,00	658.208.000,00	0,205
31	PBRX	79.549.678,73	245.625.719,50	0,324
32	ERTX	13.200.063,84	29.177.792,27	0,452
33	SRIL	134.628.276,61	887.149.399,88	0,152
34	UNIT	915.852,23	1.915.481,91	0,478
35	TRIS	13.048.263,88	47.947.291,26	0,272
36	RICY	10.443.099,39	23.362.443,53	0,447
37	BATA	27.566.960,00	65.302.022,00	0,422
38	KBLM	30.422.720,42	34.528.844,01	0,881
39	KBLI	24.286.308,41	386.129.743,49	0,063
40	SCCO	156.655.116,51	439.602.100,35	0,356

41	SKLT	8.026.883,30	25.166.206,54	0,319
42	SKBM	17.322.736,22	30.809.950,31	0,562
43	MLBI	252.522.000,00	1.320.186.000,00	0,191
44	STTP	45.345.049,18	217.746.308,54	0,208
45	ULTJ	253.029.785,15	932.482.782,65	0,271
46	INDF	2.678.358.000,00	7.385.228.000,00	0,363
47	ROTI	101.019.619,98	369.416.841,70	0,273
48	ICBP	1.530.642.000,00	7.385.228.000,00	0,207
49	DLTA	85.426.894,00	327.047.654,00	0,261
50	AISA	60.123.000,00	898.431.000,00	0,067
51	GGRM	2.405.902.000,00	8.931.136.000,00	0,269
52	HMSP	3.826.053.000,00	17.011.447.000,00	0,225
53	WIIM	45.325.281,37	136.662.997,25	0,332
54	DVLA	40.763.252,00	214.417.056,00	0,190
55	KAEF	72.733.809,24	383.025.924,67	0,190
56	KLBF	752.684.488,36	3.091.188.460,23	0,243
57	MERK	72.733.809,24	383.025.924,67	0,190
58	PYFA	2.274.563,49	7.053.407,17	0,322
59	SIDO	135.684.000,00	629.082.000,00	0,216
60	TSPC	466.394.302,99	718.958.200,37	0,649
61	ADES	6.874.000,00	61.636.000,00	0,112
62	TCID	33.536.927,16	221.475.857,64	0,151
63	UNVR	2.066.894.000,00	8.571.885.000,00	0,241
64	CINT	9.704.163,69	28.172.913,29	0,344
65	WOOD	22.814.825,94	195.081.224,52	0,117

Sumber : Data diolah, 2019

## Lampiran 8. Statistik Deskriptif

### Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
X <sub>1</sub>	195	.205	.615	.402	.10836
X <sub>2</sub>	195	.750	1.00	.99	.0432
X <sub>3</sub>	195	.012	4.763	.71	.6442
Y	195	.033	9.89	.39	.7798
Valid N (listwise)	195				

## Lampiran 9. Analisis Regresi Linier Berganda

### Model Summary<sup>b</sup>

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.750 <sup>a</sup>	.562	.551	.69799102

a. Predictors: (Constant), X<sub>2</sub>, X<sub>3</sub>, X<sub>1</sub>

b. Dependent Variable: Y

### ANOVA<sup>a</sup>

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	118.223	5	23.645	48.533	.000 <sup>b</sup>
	Residual	92.079	189	.487		
	Total	210.303	194			

a. Dependent Variable: Y

b. Predictors: (Constant), X<sub>2</sub>, X<sub>3</sub>, X<sub>1</sub>

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	.043	.050		.855	.394
X1	-.350	.045	-.453	-2.835	.007
X2	-.262	.043	-.350	-3.115	.002
X3	-.326	.050	-.319	-2.539	.010

a. Dependent Variable: Y

**Lampiran 10. Uji Asumsi Klasik**

**a. Uji Normalitas**

**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		195
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.68893758
Most Extreme Differences	Absolute	.122
	Positive	.122
	Negative	-.099
Test Statistic		.122
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200



a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

**b. Uji Multikolinearitas**

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	.043	.050		.855	.394		
X1	-.350	.045	-.453	-2.835	.007	.692	1.446
X2	-.262	.043	-.350	-3.115	.002	.708	1.413
X3	-.326	.050	-.319	-2.539	.010	.970	1.031

a. Dependent Variable: Y

**c. Uji Heteroskedastisitas**

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	.422	.027		15.396	.000
X1	.038	.024	.098	1.542	.125
X2	.226	.023	.605	1.641	.083

X3	-0.080	.027	-.158	1.195	.136
----	--------	------	-------	-------	------

a. Dependent Variable: RES2

#### d. Uji Autokorelasi

#### Model Summary<sup>b</sup>

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.750 <sup>a</sup>	.562	.551	.69799102	2.059

a. Predictors: (Constant), X2, X3, X1

b. Dependent Variable: Y

### Lampiran 11. Uji Hipotesis

#### a. Uji t

#### Coefficients<sup>a</sup>

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.043	.050		.855	.394
	X1	-.350	.045	-.453	-2.835	.007
	X2	-.262	.043	-.350	-3.115	.002
	X3	-.326	.050	-.319	-2.539	.010

a. Dependent Variable: Y

**b. Uji F**

**ANOVA<sup>a</sup>**

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	118.223	5	23.645	48.533	.000 <sup>b</sup>
	Residual	92.079	189	.487		
	Total	210.303	194			

a. Dependent Variable: Y

b. Predictors: (Constant), X2, X3, X1

**c. Uji Koefisien Determinasi**

**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.750 <sup>a</sup>	.562	.551	.69799102

a. Predictors: (Constant), X2, X3, X1

b. Dependent Variable: Y